

LAPORAN KINERJA TRIWULAN I



**DIREKTORAT KEPELABUHANAN
PERIKANAN
2026**

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2026 Direktorat Kepelabuhanan Perikanan dapat diselesaikan dengan baik. Sebagai unit eselon II di bawah Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Direktorat Kepelabuhanan Perikanan telah memanfaatkan *Balanced Scorecard* sejak tahun 2013 sebagai alat strategis dalam proses manajemen, mulai dari perencanaan hingga evaluasi dan pelaporan. Pendekatan ini memastikan seluruh unit organisasi terhubung secara vertikal maupun horizontal, dengan tujuan akhir mendukung pencapaian visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). *Balanced Scorecard* juga berperan penting dalam mengarahkan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi berdasarkan

prinsip anggaran berbasis kinerja. *Balanced Score Card* menjadi instrumen yang tepat bagi sebuah organisasi dan individu yang ada di dalamnya untuk bisa melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan prinsip anggaran berbasis kinerja.

Mengacu pada RPJMN 2026-2029 dan RKP 2026, Direktorat Kepelabuhanan Perikanan senantiasa mengoptimalkan pelaksanaan seluruh rencana aksi secara efektif dan efisien, dengan berorientasi pada target indikator kinerja yang ditetapkan. Seluruh pencapaian tersebut dirangkum dalam Laporan Kinerja ini sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi kepada publik. Penyusunan laporan ini berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja Direktorat Kepelabuhanan Perikanan Triwulan I Tahun 2026 ini memuat gambaran pencapaian kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan pembangunan sektor perikanan tangkap selama satu tahun. Kami berharap laporan ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak terkait dalam memahami pelaksanaan tugas Direktorat Kepelabuhanan Perikanan. Selamat membaca, semoga bermanfaat.

Jakarta, 15 April 2026
Direktur Kepelabuhanan Perikanan

Ady Candra

RINGKASAN EKSEKUTIF

Anggaran Direktorat Kepelabuhanan Perikanan Tahun 2026 ditetapkan sebesar 60.734.669.000. Realisasi anggaran sampai dengan akhir Triwulan I Tahun 2026 adalah sebesar Rp6.314.976.886 atau telah mencapai **10,40%** (sumber: <https://sakti.kemenkeu.go.id>). Capaian kinerja Direktorat Pelabuhan Perikanan pada Triwulan I Tahun 2026 masuk dalam kategori **Baik**, yang ditandai dengan Nilai capaian Kinerja IKU sebesar **108,14%**.

Terkait dengan Indikator Kinerja, saat ini Direktorat Kepelabuhanan Perikanan memiliki 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja di tahun 2026, dengan rincian capaian sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja	Target Tahun 2026	Target TW I 2026	Capaian TW I 2026	%
1.	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan yang Optimal dan Bertanggung Jawab				
	1. Persentase Pelabuhan Perikanan SKPT yang dikembangkan dan ditingkatkan fasilitasnya (persen)	7.1	1.3	1.3	100
	2. Persentase Operasional SKPT (persen)	96			
	3. Persentase Lokasi Pelabuhan Perikanan yang telah dianalisis terkait Kebutuhan Pembangunan dan/atau Pengembangan Pelabuhan Perikanan (Persen)	39			
	4. Rencana Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan Berwawasan Lingkungan (Dokumen)	4			
	5. Persentase Pelabuhan Perikanan Dengan Tingkat Operasional Optimum (Persen)	30			
	6. Tingkat Pelayanan di Pelabuhan Perikanan (Persen)	50			
	7. Persentase Pelabuhan Perikanan Dengan Tingkat Kinerja Baik (Persen)	17			
	8. Persentase Pelabuhan Perikanan Yang Terintegrasi Dengan Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP) (Persen)	43			
	9. Tingkat kinerja kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan (Persen)	80			
	10. Tingkat pelayanan Kapal Perikanan yang dilayani melalui mekanisme Port State Measures Agreement (PSMA) (Persen)	79			
	11. Tingkat Kinerja Penerapan Pelaksanaan Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) (Persen)	80			

No	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja	Target Tahun 2026	Target TW I 2026	Capaian TW I 2026	%
	12. Tingkat penerapan Penangkapan Ikan Terukur dan PNBP Pasca Produksi di Pelabuhan Pangkalan yang ditetapkan (Nilai)	91			
	13. Pelabuhan Pangkalan yang Menerapkan PNBP Pascaproduksi (Pelabuhan)	100			
	14. Persentase Pelaksanaan Pembangunan/ Pengembangan Pelabuhan Perikanan yang Terintegrasi dengan Fish Market Bertaraf internasional (persen)	100			
	15. Persentase Pelaksanaan Pembangunan/ Pengembangan Pelabuhan Perikanan yang Menerapkan Konsep Eco Fishing Port (persen)	100			
2.	Terwujudnya layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Kepelabuhan Perikanan				
	16. IP ASN Direktorat Kepelabuhan Perikanan (indeks)	84.5			
	17. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Kepelabuhan Perikanan (Nilai)	88.2			
	18. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang di Manfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Direktorat Kepelabuhan Perikanan (Persen)	86	86	100	116,28
	19. Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat Kepelabuhan Perikanan (Persen)	98.5			

(Sumber: Direktorat Kepelabuhan Perikanan, 2026)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	1
1.3. Tugas dan Fungsi	2
1.4. Sistematika Penyajian Laporan.....	3
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	5
2.1. Rencana Strategis	5
2.2. Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Direktorat Kepelabuhanan Perikanan	6
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2026.....	8
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	9
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	9
3.2. Analisis Capaian Kinerja	11
3.3. Akuntabilitas Keuangan	58
BAB IV. PENUTUP.....	60

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Direktorat Kepelabuhanan Perikanan memiliki peran strategis dalam mendukung pengelolaan dan pengembangan sektor perikanan tangkap yang berkelanjutan melalui penyediaan infrastruktur pelabuhan perikanan yang memadai, aman, dan terintegrasi. Pelabuhan perikanan tidak hanya berfungsi sebagai pusat aktivitas pendaratan dan distribusi hasil tangkapan, tetapi juga sebagai simpul penggerak ekonomi daerah dan nasional, serta pusat pelayanan bagi nelayan, industri perikanan, dan masyarakat pesisir.

Seiring dengan tuntutan pertumbuhan industri perikanan yang semakin dinamis, modernisasi sarana dan prasarana pelabuhan, penguatan tata kelola, serta peningkatan pelayanan di pelabuhan perikanan menjadi aspek penting dalam mendukung daya saing hasil perikanan nasional di pasar domestik maupun global. Oleh karena itu, Direktorat Kepelabuhanan Perikanan dituntut untuk terus melakukan pembenahan dan penguatan kinerja dalam merespons berbagai tantangan, mulai dari peningkatan produktivitas, optimalisasi fungsi pelabuhan, hingga adaptasi terhadap kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.

Keberadaan pelabuhan perikanan di sentra-sentra usaha perikanan tangkap memiliki peran strategis dalam mendukung kelancaran usaha penangkapan ikan beserta sektor pendukungnya. Oleh karena itu, pengembangan pelabuhan perikanan diarahkan untuk meningkatkan operasional pelabuhan sesuai dengan peran dan fungsi yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan. Implementasi pembangunan yang terarah, jelas, terukur, dan akuntabel, serta penerapan sistem pertanggungjawaban kinerja yang sesuai dengan pedoman penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, menjadi tolok ukur keberhasilan kinerja suatu instansi.

Laporan kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Direktorat Kepelabuhanan Perikanan sepanjang tahun berjalan. Laporan ini memuat capaian kinerja, hambatan yang dihadapi, serta strategi yang diterapkan dalam upaya mewujudkan pelabuhan perikanan yang profesional, efisien, dan berdaya saing tinggi. Selain sebagai sarana evaluasi dan perbaikan ke depan, laporan ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai kontribusi Direktorat Kepelabuhanan Perikanan dalam mendukung pembangunan sektor perikanan nasional.

1.2. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Kepelabuhanan Perikanan Triwulan I Tahun 2026 merupakan media informasi yang menyajikan pelaksanaan program, kegiatan, dan pengelolaan anggaran Direktorat Kepelabuhanan Perikanan selama pelaksanaan kegiatan periode Triwulan I Tahun 2026. Laporan ini disusun dengan tujuan untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja serta sasaran yang telah ditetapkan.

Hasil evaluasi yang diperoleh dirumuskan dalam bentuk kesimpulan yang dapat menjadi masukan penting serta referensi dalam merumuskan kebijakan pembangunan pelabuhan perikanan di masa mendatang. Dengan demikian, laporan ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban, tetapi juga sebagai dasar perbaikan dan pengembangan kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

1.3. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan BAB III Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 110, Direktorat Kepelabuhanan Perikanan berada di bawah Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Direktorat Kepelabuhanan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan kepelabuhanan perikanan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Kepelabuhanan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang perencanaan, pengelolaan pembangunan, pengembangan, dan operasional pelabuhan perikanan; pengelolaan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan; pengembangan bisnis dan layanan kepelabuhanan perikanan; pendataan produksi ikan hasil tangkapan di pelabuhan pangkalan; pembinaan cara penanganan ikan yang baik; serta pembinaan pengelolaan kepelabuhanan perikanan.
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pengelolaan pembangunan, pengembangan, dan operasional pelabuhan perikanan; pengelolaan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan; pengembangan bisnis dan layanan kepelabuhanan perikanan; pendataan produksi ikan hasil tangkapan di pelabuhan pangkalan; pembinaan cara penanganan ikan yang baik; serta pembinaan pengelolaan kepelabuhanan perikanan.
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan, pengelolaan pembangunan, pengembangan, dan operasional pelabuhan perikanan; pengelolaan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan; pengembangan bisnis dan layanan kepelabuhanan perikanan; pendataan produksi ikan hasil tangkapan di pelabuhan pangkalan; pembinaan cara penanganan ikan yang baik; serta pembinaan pengelolaan kepelabuhanan perikanan.
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, pengelolaan pembangunan, pengembangan, dan operasional pelabuhan perikanan; pengelolaan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan; pengembangan bisnis dan layanan kepelabuhanan perikanan; pendataan produksi ikan hasil tangkapan di pelabuhan pangkalan; pembinaan cara penanganan ikan yang baik; serta pembinaan pengelolaan kepelabuhanan perikanan.
5. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan, pengelolaan pembangunan, pengembangan, dan operasional pelabuhan perikanan; pengelolaan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan; pengembangan bisnis dan layanan kepelabuhanan perikanan; pendataan produksi ikan hasil tangkapan di pelabuhan

pangkalan; pembinaan cara penanganan ikan yang baik; serta pembinaan pengelolaan kepelabuhanan perikanan.

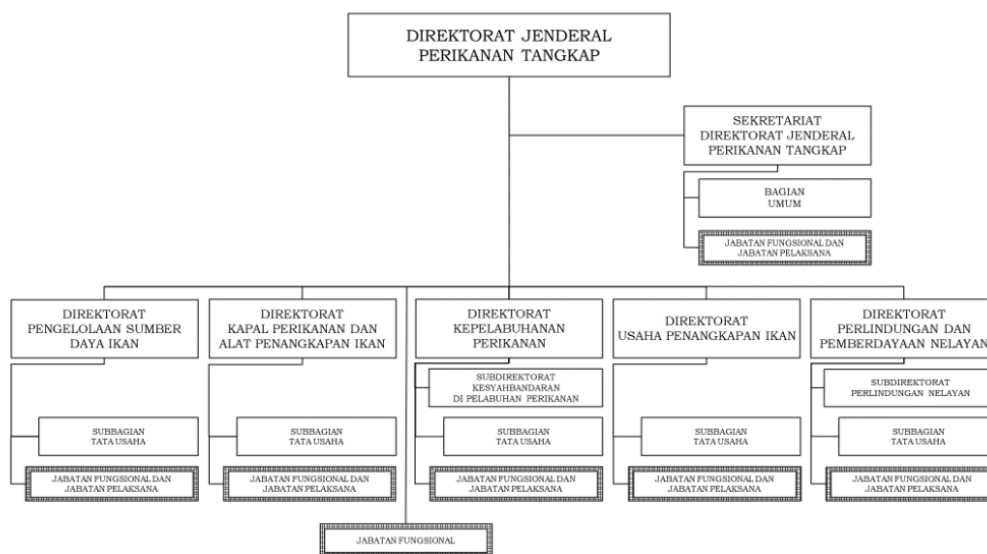
6. Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Kepelabuhanan Perikanan.

Susunan organisasi Direktorat Kepelabuhanan Perikanan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan;
- b. Subbagian Tata Usaha; dan
- c. Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat Kepelabuhanan Perikanan membentuk 8 (delapan) Tim Kerja yang menggambarkan proses bisnis pelaksanaan tugas dan fungsi mulai dari analisis kebutuhan Pembangunan/pengembangan pelabuhan perikanan, pelaksanaan dan pengendalian Pembangunan pelabuhan perikanan, pengelolaan Pembangunan pelabuhan perikanan yang berasal dari pinjaman hibah luar negeri, pelaksanaan fungsi perusahaan dan pengoperasian pelabuhan perikanan, pelaksanaan fungsi pemerintahan dan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan, pengelolaan pelabuhan pangkalan penangkapan ikan terukur serta mendukung penarikan PNPB Pasca Produksi, analisis dan evaluasi kinerja pelabuhan perikanan dan unsur dukungan manajerial.

Gambar 1. Stuktur Organisasi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.



1.4. Sistematika Penyajian Laporan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja Direktorat Kepelabuhanan Perikanan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, Pada bagian ini disajikan informasi umum tentang Laporan Kinerja yang menjadi tanggung jawab sebuah instansi pemerintah, penjelasan secara umum suatu organisasi serta bagan organisasi dan informasi tentang alur capaian kinerja yang meliputi dari

perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan, evaluasi kinerja dan capaian kinerja selama waktu tertentu (waktu pelaporan).

Bab II Perencanaan Kinerja, Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai visi, misi dan rencana hasil yang akan dicapai (tujuan dan sasaran strategis, indikator kinerja dan targetnya) dalam rencana jangka menengah (RPJM/Renstra), rencana kinerja tahunan (RKT/Renja) dan penetapan kinerja (PK) pada periode triwulan yang tertentu.

Bab III Akuntabilitas Kinerja, Pada Bab ini memuat uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkahlangkah antisipatif yang akan diambil. Selain itu, disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas - tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran/tujuan organisasi yang telah ditetapkan serta langkah-langkah peningkatan dan efisiensi.

Bab IV Penutup, pada bagian ini diuraikan kesimpulan secara umum tentang capaian kinerja organisasi, tindaklanjut rekomendasi periode sebelumnya, serta rekomendasi tindak lanjut yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran, pada bagian ini dilampirkan dokumen perjanjian kinerja, serta dokumen kinerja lainnya.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan pada pembangunan subsektor perikanan tangkap diarahkan untuk memperbaiki komunikasi dengan nelayan, evaluasi kebijakan, penyederhanaan izin, pengembangan pelabuhan, penangkapan ikan sampai dengan ZEEI dan laut lepas, serta peningkatan pendapatan melalui akses permodalan, perlindungan dan perbaikan hidup nelayan.

Salah satu arah kebijakan DJPT dari hasil penterjemahan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut adalah pengelolaan sumber daya perikanan tangkap yang berkelanjutan. Pengelolaan perikanan tangkap dilakukan melalui peningkatan efektivitas tata kelola sumber daya perikanan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, yang dilaksanakan dengan salah satu langkah yaitu penyediaan infrastruktur dan operasionalisasi pelabuhan perikanan unggul, terintegrasi, dan berwawasan lingkungan. Dalam upaya penyediaan infrastruktur perikanan tangkap yang terintegrasi, beberapa indikasi kegiatan secara spesifik diarahkan untuk:

1. pembangunan/pengembangan pelabuhan perikanan sesuai Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional termasuk pembangunan pelabuhan perikanan bertaraf internasional (*major project* RPJMN);
2. Penerapan standarisasi pelabuhan perikanan ramah lingkungan melalui *Eco Fishing Port*, termasuk didalamnya penguatan instrumen SHTI, serta penerapan CPIB dan inspeksi pembongkaran ikan;
3. Penguatan Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP) untuk mendukung keterpaduan data dalam Data Sharing System (DSS);
4. Penguatan SDM pengelola pelabuhan perikanan termasuk penambahan Syahbandar perikanan;
5. Standardisasi ketersediaan kualitas fisik sarana prasarana, operasional, fungsi pelayanan (ISO-9001), serta penetapan aspek hukum di Wilayah Kerja dan Pengoperasian Pelabuhan Perikanan (WKOPP);
6. Peningkatan sinergi bisnis perikanan terutama dengan sistem pengolahan dan pemasaran, termasuk melalui integrasinya dengan pasar ikan bertaraf internasional;
7. Peningkatan keterpaduan pelabuhan perikanan UPT pusat dan UPTD dalam mengimplementasikan Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional (RIPPN); baik dari aktivitas, data dan informasi, serta peningkatan konektivitasnya melalui sistem IT, termasuk melalui pengembangan pelabuhan perikanan prioritas di daerah maupun alternatif peningkatan kelembagaannya;
8. Penguatan manajemen risiko fasilitas, termasuk terhadap faktor alam (pendangkalan, bencana alam); dan
9. Peningkatan fungsi operasional SKPT Merauke, SKPT Natuna, SKPT Sebatik, dan SKPT Saumlaki.

2.2. Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Direktorat Kepelabuhanan Perikanan

Pada tahun 2026, Direktorat Kepelabuhanan Perikanan menetapkan 2 Sasaran kegiatan dengan 19 Indikator Kinerja pada tahun 2026 sebagai berikut:

Tabel 1. Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja dan Target Direktorat Kepelabuhanan Perikanan Tahun 2026

No	Sasaran/Indikator Kinerja	Target				
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TAHUN
1.	Pengelolaan pelabuhan perikanan yang optimal dan bertanggungjawab.					
1	Persentase pelabuhan perikanan yang dikembangkan dan ditingkatkan fasilitasnya (persen)	1.3	2.6	5.2	7.1	7.1
2	Persentase Operasional SKPT (persen)					96
3	Persentase Lokasi Pelabuhan Perikanan yang telah dianalisis terkait Kebutuhan Pembangunan dan/atau Pengembangan Pelabuhan Perikanan (Persen)					39
4	Rencana Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan Berwawasan Lingkungan (Dokumen)					4
5	Persentase Pelabuhan Perikanan Dengan Tingkat Operasional Optimum (Persen)					30
6	Tingkat Pelayanan di Pelabuhan Perikanan (Persen)					50
7	Persentase Pelabuhan Perikanan Dengan Tingkat Kinerja Baik (Persen)					17
8	Persentase Pelabuhan Perikanan Yang Terintegrasi Dengan Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP) (Persen)					43
9	Tingkat kinerja kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan (Persen)					80
10	Tingkat pelayanan Kapal Perikanan yang dilayani melalui mekanisme Port State Measures Agreement (PSMA) (Persen)					79
11	Tingkat Kinerja Penerapan Pelaksanaan Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) (Persen)					80
12	Tingkat penerapan Penangkapan Ikan Terukur dan PNBP Pasca Produksi di Pelabuhan Pangkalan yang ditetapkan (Nilai)					91
13	Pelabuhan Pangkalan yang Menerapkan PNBP Pascaproduksi (Pelabuhan)					110
14	Persentase Pelaksanaan Pembangunan/ Pengembangan Pelabuhan Perikanan yang Terintegrasi dengan <i>Fish Market</i> Bertaraf					100

No	Sasaran/Indikator Kinerja	Target				
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TAHUN
	internasional (Persen)					
15	Persentase Pelaksanaan Pembangunan/ Pengembangan Pelabuhan Perikanan yang Menerapkan Konsep <i>Eco Fishing Port</i> (Persen)					100
2.	Terwujudnya layanan dukungan manajerial yang baik lingkup Direktorat Kepelabuhanan Perikanan					
16	IP ASN Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (indeks)		82		84.5	84.5
17	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (Nilai)					88,2
18	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang di Manfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (Persen)	86	86	86	86	86
19	Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (Persen)					98,6

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2026

Pada tahun 2026, Direktorat Kepelabuhanan Perikanan menetapkan 19 Indikator Kinerja dengan 2 Sasaran Kegiatan sebagai berikut:



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
 JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
 JAKARTA 10110 KOTAK POS 4133 JKP 10041
 TELEFON (021) 3819070 (LACAKU) FAKSIMILE (021) 3521782
 LAMAN www.kkp.go.id SUREL dp@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DIREKTORAT KEPELABUHANAN PERIKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ady Candra**
 Jabatan : **Direktur Kepelabuhanan Perikanan**
 Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Lotharia Latif**
 Jabatan : **Direktur Jenderal Perikanan Tangkap**
 Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 14 Januari 2026

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap,



Lotharia Latif

Pihak Pertama
Direktur Kepelabuhanan Perikanan,



Ady Candra

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan yang Optimal dan Bertanggung Jawab	1. Persentase Pelabuhan Perikanan yang Dikembangkan dan Ditingkatkan Fasilitasnya (persen)	7,1
		2. Persentase Operasional SKPT (persen)	96
		3. Persentase Lokasi Pelabuhan Perikanan yang Telah Dianalisis Terkait Kebutuhan Pembangunan dan/atau Pengembangan Pelabuhan Perikanan (persen)	39
		4. Rencana Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan Berkeadilan Lingkungan (dokumen)	4
		5. Persentase Pelabuhan Perikanan Dengan Tingkat Operasional Optimum (persen)	30
		6. Tingkat Pelayanan di Pelabuhan Perikanan (persen)	50
		7. Persentase Pelabuhan Perikanan Dengan Tingkat Kinerja Baik (persen)	17
		8. Persentase Pelabuhan Perikanan Yang Terintegrasi Dengan Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP) (persen)	43
		9. Tingkat Kinerja Keseluruhan di Pelabuhan Perikanan (persen)	80
		10. Tingkat Pelayanan Kapal Perikanan yang Diayani Melalui Mekanisme Port State Measures Agreement (PSMA) (persen)	70
		11. Tingkat Kinerja Penerapan Pelaksanaan Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) (persen)	80
		12. Tingkat Penerapan Penangkapan Ikan Terukur dan PNBP Pasca Produksi di Pelabuhan Pangkalan yang Ditetapkan (nilai)	91
		13. Pelabuhan Pangkalan yang Menerapkan PNBP Pascaproduksi (pelabuhan)	110
		14. Persentase Pelaksanaan Pembangunan/ Pengembangan Pelabuhan Perikanan yang Terintegrasi dengan Fish Market Beraraf Internasional (persen)	100
		15. Persentase Pelaksanaan Pembangunan/ Pengembangan Pelabuhan Perikanan yang Menerapkan Konsep Eco Fishing Port (persen)	100

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
2.	Terwujudnya layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Kepelabuhanan Perikanan	16. IP ASN Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (indeks)	84,5
		17. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (nilai)	88,2
		18. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang di Manfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (persen)	86
		19. Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (persen)	98,6

Data Anggaran:

No.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	85.399.629.000
Total Anggaran Direktorat Kepelabuhanan Perikanan		85.399.629.000

Jakarta, 14 Januari 2026

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap



Lotharia Latif

Pihak Pertama
Direktur Kepelabuhanan Perikanan

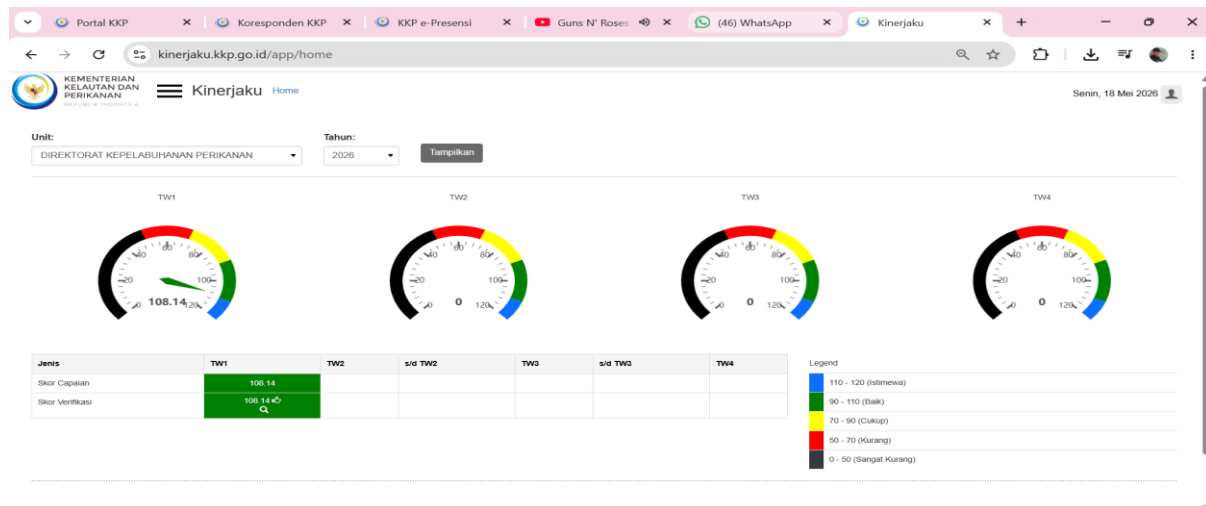


Ady Candra

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Kegiatan pembangunan pelabuhan perikanan pada tahun 2026 sebagaimana Perjanjian Kinerja (PK) Direktur Kepelabuhanan Perikanan menitik beratkan pada 2 (dua) Sasaran Strategis dengan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama dan 4 (empat) Indikator Kinerja untuk menunjang pencapaian visi dan misi Ditjen Perikanan Tangkap. Hasil pengukuran kinerja inilah yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja (LKj) tingkat Eselon II dalam bentuk dashboard sebagai berikut:



Gambar 2. Dashboard Kinerjaku Triwulan I Tahun 2026 Direktorat Kepelabuhanan Perikanan

Capaian kinerja Direktorat Kepelabuhanan Perikanan pada Triwulan I Tahun 2026 memiliki kategori **“Baik”**, ditandai dengan Skor Capaian sebesar **108.14%**.

Pada tahun Triwulan I Tahun 2026, dari 19 Indikator Kinerja, terdapat 2 Indikator Kinerja yang dilakukan perhitungan yaitu Indikator Kinerja Persentase pelabuhan perikanan yang dikembangkan dan ditingkatkan fasilitasnya dan Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang di Manfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Direktorat Kepelabuhanan Perikanan. Adapun rekapitulasi capaian kinerja Direktorat Kepelabuhanan Perikanan Triwulan I Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Capaian Indikator Kinerja Direktorat Kepelabuhanan Perikanan TW I 2026

No	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja	Target Tahun 2026	Target TW I 2026	Capaian TW I 2026	%
1.	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan yang Optimal dan Bertanggung Jawab				
	1. Persentase Pelabuhan Perikanan SKPT yang dikembangkan dan ditingkatkan fasilitasnya (persen)	7.1	1.3	1.3	100
	2. Persentase Pembangunan Pelabuhan Perikanan SKPT (persen)	96			

No	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja	Target Tahun 2026	Target TW I 2026	Capaian TW I 2026	%
	3. Persentase Lokasi Pelabuhan Perikanan yang telah dianalisis terkait Kebutuhan Pembangunan dan/atau Pengembangan Pelabuhan Perikanan (Persen)	39			
	4. Rencana Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan Berwawasan Lingkungan (Dokumen)	4			
	5. Persentase Pelabuhan Perikanan Dengan Tingkat Operasional Optimum (Persen)	30			
	6. Tingkat Pelayanan di Pelabuhan Perikanan (Persen)	50			
	7. Persentase Pelabuhan Perikanan Dengan Tingkat Kinerja Baik (Persen)	17			
	8. Persentase Pelabuhan Perikanan Yang Terintegrasi Dengan Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP) (Persen)	43			
	9. Tingkat kinerja kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan (Persen)	80			
	10. Tingkat pelayanan Kapal Perikanan yang dilayani melalui mekanisme Port State Measures Agreement (PSMA) (Persen)	79			
	11. Tingkat Kinerja Penerapan Pelaksanaan Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) (Persen)	80			
	12. Tingkat penerapan Penangkapan Ikan Terukur dan PNBP Pasca Produksi di Pelabuhan Pangkalan yang ditetapkan (Nilai)	91			
	13. Pelabuhan Pangkalan yang Menerapkan PNBP Pascaproduksi (Pelabuhan)	110			
	14. Persentase Pelaksanaan Pembangunan/ Pengembangan Pelabuhan Perikanan yang Terintegrasi dengan Fish Market Bertaraf internasional (persen)	100			
	15. Persentase Pelaksanaan Pembangunan/ Pengembangan Pelabuhan Perikanan yang	100			

No	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja	Target Tahun 2026	Target TW I 2026	Capaian TW I 2026	%
	Menerapkan Konsep Eco Fishing Port (persen)				
2.	Terwujudnya layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Kepelabuhanan Perikanan				
	16. IP ASN Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (indeks)	84.5			
	17. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (Nilai)	88.2			
	18. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang di Manfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (Persen)	86	86	100	116,28
	19. Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (Persen)	98,5			

3.2. Analis Capaian Kinerja

Pada periode tahun 2026, Direktorat Kepelabuhanan Perikanan melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai sasaran yang kegiatan yang diuraikan sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan (SK) 1 – Pengelolaan Pelabuhan Perikanan yang Optimal dan Bertanggung Jawab

Indikator Kinerja (IK) pada SK 1 yaitu:

1. Persentase pelabuhan perikanan yang dikembangkan dan ditingkatkan fasilitasnya.
2. Persentase Operasional SKPT.
3. Persentase Lokasi Pelabuhan Perikanan yang telah dianalisis terkait Kebutuhan Pembangunan dan/atau Pengembangan Pelabuhan Perikanan.
4. Rencana Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan Berwawasan Lingkungan.
5. Persentase Pelabuhan Perikanan Dengan Tingkat Operasional Optimum.
6. Tingkat Pelayanan di Pelabuhan Perikanan.
7. Persentase Pelabuhan Perikanan Dengan Tingkat Kinerja Baik.
8. Persentase Pelabuhan Perikanan Yang Terintegrasi Dengan Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP).
9. Tingkat kinerja kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan.

10. Tingkat pelayanan Kapal Perikanan yang dilayani melalui mekanisme Port State Measures Agreement (PSMA).
11. Tingkat Kinerja Penerapan Pelaksanaan Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI).
12. Tingkat penerapan Penangkapan Ikan Terukur dan PNBP Pasca Produksi di Pelabuhan Pangkalan yang ditetapkan.
13. Pelabuhan Pangkalan yang Menerapkan PNBP Pascaproduksi.
14. Persentase Pelaksanaan Pembangunan/ Pengembangan Pelabuhan Perikanan yang Terintegrasi dengan Fish Market Bertaraf internasional.
15. Persentase Pelaksanaan Pembangunan/ Pengembangan Pelabuhan Perikanan yang Menerapkan Konsep Eco Fishing Port.

Indikator Kinerja (IK) 1 – Persentase pelabuhan perikanan yang dikembangkan dan ditingkatkan fasilitasnya.

Indikator ini menunjukkan persentase Pelabuhan Perikanan yang dikembangkan dan ditingkatkan fasilitasnya guna mendukung operasional dan pelayanan sesuai dengan fungsi Pelabuhan Perikanan.

Capaian pengembangan dan peningkatan fasilitas di pelabuhan perikanan berupa kegiatan sebagai berikut:

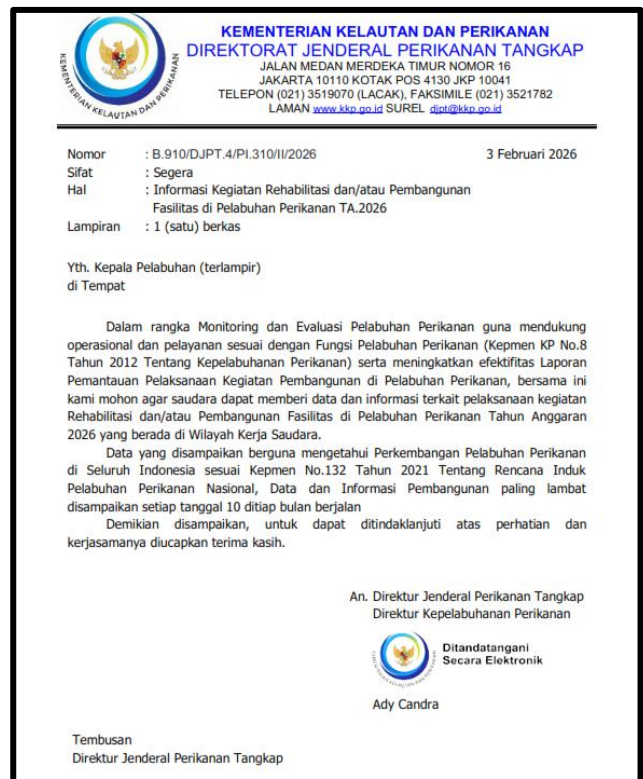
1. Penyiapan dokumen perencanaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Perikanan
2. Penyiapan dokumen tender/pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Perikanan
3. Pembahasan dan Penyiapan Dokumen Kontrak Konstruksi Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Perikanan
4. Penyiapan dokumen pengadaan jasa konsultasi pengawasan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Perikanan
5. Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Perikanan
6. Pengendalian pelaksanaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Perikanan
7. Monitoring dan Evaluasi Progres Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Perikanan

Tabel 3. Capaian IK Persentase pelabuhan perikanan yang dikembangkan dan ditingkatkan fasilitasnya” TW I Tahun 2026

SK 1 Pengembangan dan peningkatan fasilitas pelabuhan perikanan yang optimal											
IK 11 Persentase pelabuhan perikanan yang dikembangkan dan ditingkatkan fasilitasnya (persen)											
Realisasi 2020-2024					Realisasi 2026					Renstra DJPT	
TW I Tahun 2021	TW I Tahun 2022	TW I Tahun 2023	TW I Tahun 2024	TW I Tahun 2025	Target Tahun 2026	Target TW I	Realisasi TW I	% Realisasi thd target TW I	% Realisasi thd Target Tahun 2026	Target Renstra 2026	% Capaian Tahun 2026 thd Target Akhir Renstra
8	5,26	5,09	5		7,1	1,3	1,3	100	100		

Pada Triwulan I Tahun 2026, Indikator kinerja Persentase pelabuhan perikanan yang dikembangkan dan ditingkatkan fasilitasnya telah tercapai 1,3% sesuai target.

Kegiatan yang mendukung pencapaian target Indikator Kinerja ini adalah pelaksanaan inventarisasi pengumpulan data rehabilitasi/pengembangan/Pembangunan fasilitas di pelabuhan perikanan yang terdiri dari UPT Pusat, Pelabuhan Perikanan Perintis, SKPT dan Pelabuhan Perikanan yang termasuk dalam Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional (RIPPN). Melalui pengiriman Surat dari Direktur Kepelabuhanan Terkait Informasi Kegiatan Rehabilitasi/Pengembangan/Pembangunan Fasilitas di Pelabuhan Perikanan di TA. 2026 nomor B.910/DJPT.4/PI.310/II/2026 tanggal 3 Februari 2026 yang ditujukan kepada 22 UPT Pusat KKP dan 9 Pelabuhan Perintis. Sampai dengan bulan Maret tahun 2026, terdapat 9 balasan surat terkait informasi kegiatan rehabilitasi/pengembangan/Pembangunan.



Indikator Kinerja (IK) 2 – Persentase Operasional SKPT

Merupakan indikator yang menunjukkan persentase operasional di SKPT guna mendukung operasional dan pelayanan sesuai dengan fungsi Pelabuhan Perikanan.

Persentase capaian progres Operasional pelabuhan perikanan di 7 (tujuh) SKPT meliputi:

1. Kriteria Teknis dan Operasional Pelabuhan Perikanan menurut PP No.27 tahun 2021 (90%)
2. Pengusulan Kelembagaan SKPT (10%)

- Pengusulan Kelembagaan SKPT/Pelabuhan Perikanan

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan pasal 184, pelabuhan perikanan memiliki fungsi sebagai sarana pemerintahan dan pengusaha. Fungsinya adalah mendukung seluruh aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan serta lingkungannya, mulai dari tahap praproduksi, produksi, pengolahan hingga pemasaran hasil perikanan.

Sesuai dengan pasal 41 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Menteri bertugas menetapkan klasifikasi pelabuhan perikanan, tata kelola pelabuhan, serta persyaratan dan standar teknis operasionalnya. Selain itu, pasal 209 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 mengatur bahwa setiap pelabuhan perikanan yang telah

beroperasi wajib memiliki lembaga pengelola. Pada pasal 211 ayat (1), diatur pula bahwa pelabuhan yang telah memiliki lembaga pengelola dapat ditetapkan atau ditingkatkan kelasnya berdasarkan kriteria teknis dan operasional.

Saat ini, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) memandang perlu adanya penguatan organisasi pada sembilan Pelabuhan Perikanan Perintis yang telah beroperasi, yaitu PP Untia, PP Teluk Awang, PP Merauke, PP Selat Lampa, PP Cikidang, PP Teluk Sinabang, PP Daeo Majiko, PP Ukurlaran, dan PP Sebatik, termasuk pada Unit Pelaksana Teknis pelabuhan perikanan lainnya. Upaya ini dilakukan untuk memperkuat kapasitas anggaran, sumber daya manusia, kesinambungan layanan, serta peningkatan penerimaan negara melalui status kelembagaan yang lebih jelas. Dengan demikian, pengelolaan aset negara di pelabuhan perikanan akan lebih terkendali dan pelaksanaan fungsi pengawasan menjadi lebih optimal. Oleh karena itu, pembentukan UPT Pelabuhan Perikanan merupakan langkah strategis dalam penataan kelembagaan guna memperkuat tata kelola, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan, serta mendukung pencapaian tujuan pelabuhan perikanan dalam mendorong kemajuan sektor kelautan dan perikanan nasional.

Dari 9 (sembilan) Pelabuhan Perikanan Perintis, yang diusulkan menjadi calon UPT Pelabuhan Perikanan sejumlah 8 (tujuh) Pelabuhan Perikanan Perintis dengan lokasi pada Tabel.1 sebagai berikut:

Tabel 1. Daftar Calon UPT Pelabuhan Perikanan

No	Satker	Lokasi
1.	Pelabuhan Perikanan Cikidang	Pangandaran, Jawa Barat
2.	Pelabuhan Perikanan Selat Lampa	Natuna, Kepulauan Riau
3.	Pelabuhan Perikanan Sebatik	Nunukan, Kalimantan Utara
4.	Pelabuhan Perikanan Teluk Awang	Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat
5.	Pelabuhan Perikanan Ukurlaran	Kep. Tanimbar, Maluku
6.	Pelabuhan Perikanan Merauke	Merauke, Papua
7.	Pelabuhan Perikanan Untia	Makassar, Sulawesi Selatan
8.	Pelabuhan Perikanan Daeo Majiko	Morotai, Maluku Utara

Secara umum, profil 8 (delapan) Pelabuhan Perikanan Perintis yang akan diusulkan pembentukan organisasinya, dideskripsikan pada 3 (tiga) aspek meliputi antropologi sosial, ekonomi dan lingkungan sebagai berikut:

- 1) Pelabuhan Perikanan Cikidang terletak di Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat. Berikut adalah deskripsi pelabuhan tersebut dari aspek antropologi sosial, ekonomi, dan lingkungan:

Aspek Antropologi Sosial:

Pelabuhan ini menjadi pusat aktivitas masyarakat nelayan yang mayoritas berasal dari suku Sunda dan Jawa. Terdapat interaksi sosial yang erat antara nelayan, pedagang ikan, dan pekerja pelabuhan yang terjalin dari kegiatan sehari-hari. Pelabuhan menjadi tempat berkembangnya budaya maritim dan tradisi nelayan yang turun-temurun. Pembagian peran gender dalam kegiatan di pelabuhan cenderung lebih tradisional, dengan kaum laki-laki lebih banyak terlibat dalam aktivitas melaut.

Aspek Ekonomi:

Pelabuhan ini berada di Wilayah Pengelolaan Perikanan 573 Perairan Samudera Hindia sebelah Selatan Jawa hingga sebelah Selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu, dan Laut Timor bagian Barat. Berdasarkan Permen KP No 19 Tahun 2022, estimasi potensi sumber daya ikan di WPP 573 sebesar 1.338.442 ton/tahun meliputi komoditas jenis Ikan Pelagis Kecil, Ikan Pelagis Besar, Ikan Demersal, Ikan Karang, Udang Penaeid, Lobster, Kepiting, Rajungan, Cumicumi. Pelabuhan Perikanan Cikidang menjadi sumber mata pencaharian utama bagi masyarakat pesisir di Pangandaran yang bergantung pada sektor perikanan tangkap. Hasil tangkapan ikan dari pelabuhan ini menyuplai kebutuhan protein hewani bagi penduduk Pangandaran dan daerah sekitarnya. Terdapat aktivitas ekonomi seperti penjualan ikan, penyediaan perbekalan nelayan, dan jasa-jasa terkait yang berkembang di sekitar pelabuhan. Pelabuhan ini juga memfasilitasi distribusi hasil laut ke pasar-pasar di wilayah Jawa Barat.

Aspek Lingkungan:

Pelabuhan berada di kawasan pesisir yang rentan terhadap perubahan lingkungan seperti abrasi pantai dan pencemaran laut. Aktivitas di pelabuhan dapat berdampak pada ekosistem terumbu karang dan biota laut lainnya jika tidak dikelola dengan baik. Terdapat upaya pelestarian lingkungan laut oleh komunitas nelayan setempat, seperti program penghijauan terumbu karang dan pengelolaan sampah.

- 2) Pelabuhan Perikanan Selat Lampa di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau dibangun diatas lahan seluas ± 20 Hektar yang memiliki peran penting dari aspek antropologi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Berikut deskripsinya:

Aspek Antropologi Sosial:

Pelabuhan ini menjadi pusat aktivitas masyarakat nelayan yang sebagian besar berasal dari suku Melayu Kepulauan. Terdapat interaksi sosial yang erat antara nelayan, pedagang ikan, dan pekerja pelabuhan yang membentuk ikatan komunitas maritim yang kuat. Pelabuhan menjadi tempat melestarikan budaya dan tradisi nelayan Melayu Kepulauan, seperti upacara adat sebelum melaut dan perayaan hari-hari besar. Pembagian peran gender dalam kegiatan di pelabuhan cenderung tradisional, dengan kaum laki-laki lebih banyak terlibat dalam penangkapan ikan, sementara kaum perempuan berperan dalam pengolahan dan pemasaran hasil tangkapan.

Aspek Ekonomi:

Pelabuhan ini berada di Wilayah Pengelolaan Perikanan 711 Perairan Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut Natuna Utara. Berdasarkan Permen KP No 19 Tahun 2022, estimasi potensi sumber daya ikan di WPP 711 sebesar 1.306.379 ton/tahun meliputi komoditas jenis Ikan Pelagis Kecil, Ikan Pelagis Besar, Ikan Demersal, Ikan Karang, Udang Penaeid, Lobster, Kepiting, Rajungan, Cumi-cumi. Pelabuhan Perikanan Selat Lampa menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat pesisir di Kabupaten Natuna yang bergantung pada sektor perikanan tangkap. Hasil tangkapan ikan dari pelabuhan ini menyuplai kebutuhan protein hewani bagi penduduk Natuna dan daerah sekitarnya. Terdapat aktivitas ekonomi seperti penjualan ikan, penyediaan perbekalan nelayan, dan jasa-jasa terkait yang berkembang di sekitar pelabuhan. Pelabuhan ini juga memfasilitasi distribusi hasil laut ke pasar-pasar di wilayah Kepulauan Riau dan daerah lainnya, serta ekspor ke negara-negara tetangga

Aspek Lingkungan:

Pelabuhan berada di kawasan pesisir yang rentan terhadap perubahan lingkungan seperti abrasi pantai, pencemaran laut, dan kerusakan ekosistem laut. Aktivitas di pelabuhan dapat berdampak pada ekosistem terumbu karang dan biota laut lainnya jika tidak dikelola dengan baik. Terdapat upaya pelestarian lingkungan laut oleh komunitas nelayan setempat, seperti program penghijauan terumbu karang, pengelolaan sampah, dan konservasi sumber daya laut. Pelabuhan memperhatikan aspek-aspek lingkungan seperti pengelolaan limbah dan menjaga kualitas perairan untuk menjamin keberlanjutan kegiatan perikanan dan kelestarian ekosistem laut.

- 3) Pelabuhan Perikanan Sebatik merupakan salah satu pelabuhan perikanan penting di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Berikut deskripsi pelabuhan tersebut dari aspek antropologi sosial, ekonomi, dan lingkungan:

Aspek Antropologi Sosial:

Pelabuhan ini menjadi pusat aktivitas masyarakat nelayan yang sebagian besar berasal dari suku Bugis, suku Bajo, dan suku-suku lokal lainnya. Terdapat interaksi sosial yang kuat antara nelayan, pedagang ikan, dan pekerja pelabuhan dari berbagai latar belakang budaya. Pelabuhan menjadi tempat berbaur dan asimilasi budaya maritim dari berbagai etnis, seperti tradisi melaut dan upacara adat nelayan. Pembagian peran gender dalam kegiatan di pelabuhan cenderung lebih terbuka, dengan kaum perempuan juga terlibat dalam aktivitas penangkapan ikan dan perdagangan.

Aspek Ekonomi:

Pelabuhan Perikanan Sebatik berada di WPP 716 Perairan Laut Sulawesi dan sebelah Utara Pulau Halmahera. Berdasarkan Permen KP No 19 Tahun 2022, estimasi potensi sumber daya ikan di WPP 716 sebesar 567.045 ton/tahun meliputi komoditas jenis Ikan Pelagis Kecil, Ikan Pelagis Besar, Ikan Demersal, Ikan Karang, Udang Penaeid, Lobster, Kepiting, Rajungan, Cumicumi. Pelabuhan Perikanan Sebatik Nunukan menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat pesisir di Kabupaten Nunukan yang bergantung pada sektor perikanan tangkap.

Hasil tangkapan ikan dari pelabuhan ini menyuplai kebutuhan protein hewani bagi penduduk Nunukan dan daerah sekitarnya. Terdapat aktivitas ekonomi seperti penjualan ikan, penyediaan perbekalan nelayan, dan jasa-jasa terkait yang berkembang di sekitar pelabuhan. Pelabuhan ini juga memfasilitasi ekspor hasil laut ke negara-negara tetangga seperti Malaysia.

Aspek Lingkungan:

Pelabuhan berada di kawasan pesisir yang rentan terhadap perubahan lingkungan seperti abrasi pantai, pencemaran laut, dan kerusakan ekosistem laut. Aktivitas di pelabuhan dapat berdampak pada ekosistem terumbu karang, hutan bakau, dan biota laut lainnya jika tidak dikelola dengan baik. Terdapat upaya pelestarian lingkungan laut oleh komunitas nelayan setempat, seperti program penghijauan terumbu karang, konservasi hutan bakau, dan pengelolaan sampah.

- 4) Pelabuhan Perikanan Teluk Awang terletak di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Berikut deskripsi pelabuhan tersebut dari aspek antropologi sosial, ekonomi, dan lingkungan:

Aspek Antropologi Sosial:

Pelabuhan ini menjadi pusat aktivitas masyarakat nelayan yang sebagian besar berasal dari suku Sasak dan suku Bali. Terdapat interaksi sosial yang erat antara nelayan, pedagang ikan, dan pekerja pelabuhan yang membentuk ikatan komunitas maritim yang kuat.

Pelabuhan menjadi tempat melestarikan budaya dan tradisi nelayan Sasak dan Bali, seperti upacara adat sebelum melaut dan perayaan hari-hari besar. Pembagian peran gender dalam kegiatan di pelabuhan cenderung tradisional, dengan kaum laki-laki lebih banyak terlibat dalam penangkapan ikan, sementara kaum perempuan berperan dalam pengolahan dan pemasaran hasil tangkapan.

Aspek Ekonomi:

Pelabuhan ini berada di Wilayah Pengelolaan Perikanan 573 perairan Samudera Hindia sebelah Selatan Jawa hingga sebelah Selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu, dan Laut Timor bagian Barat. Berdasarkan Permen KP No 19 Tahun 2022, estimasi potensi sumber daya ikan di WPP 573 sebesar 1.338.442 ton/tahun meliputi komoditas jenis Ikan Pelagis Kecil, Ikan Pelagis Besar, Ikan Demersal, Ikan Karang, Udang Penaeid, Lobster, Kepiting, Rajungan, Cumi-cumi. Pelabuhan Perikanan Teluk Awang menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat pesisir di Kabupaten Lombok Tengah yang bergantung pada sektor perikanan tangkap. Hasil tangkapan ikan dari pelabuhan ini menyuplai kebutuhan protein hewani bagi penduduk Lombok dan daerah sekitarnya. Terdapat aktivitas ekonomi seperti penjualan ikan, penyediaan perbekalan nelayan, dan jasa-jasa terkait yang berkembang di sekitar pelabuhan. Pelabuhan ini juga memfasilitasi distribusi hasil laut ke pasar-pasar di wilayah Nusa Tenggara Barat dan daerah lainnya.

Aspek Lingkungan:

Pelabuhan berada di kawasan pesisir yang rentan terhadap perubahan lingkungan seperti abrasi pantai, pencemaran laut, dan kerusakan ekosistem laut.

Aktivitas di pelabuhan dapat berdampak pada ekosistem terumbu karang dan biota laut lainnya jika tidak dikelola dengan baik. Terdapat upaya pelestarian lingkungan laut oleh komunitas nelayan setempat, seperti program penghijauan terumbu karang dan pengelolaan sampah.

- 5) Pelabuhan Perikanan Ukur Laran terletak di Kota Saumlaki, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku. Berikut deskripsi pelabuhan tersebut dari aspek antropologi sosial, ekonomi, dan lingkungan:

Aspek Antropologi Sosial:

Pelabuhan ini menjadi pusat aktivitas masyarakat nelayan yang sebagian besar berasal dari suku Tanimbar dan suku-suku lain di Maluku Tenggara Barat. Terdapat interaksi sosial yang erat antara nelayan, pedagang ikan, dan pekerja pelabuhan yang membentuk ikatan komunitas maritim. Pelabuhan menjadi tempat melestarikan budaya dan tradisi nelayan Tanimbar, seperti upacara adat sebelum melaut dan perayaan hari-hari besar. Pembagian peran gender dalam kegiatan di pelabuhan cenderung tradisional, dengan kaum laki-laki lebih banyak terlibat dalam penangkapan ikan, sementara kaum perempuan berperan dalam pengolahan dan pemasaran hasil tangkapan.

Aspek Ekonomi:

Pelabuhan ini berada di Wilayah Pengelolaan Perikanan Perairan 714 Teluk Tolo dan Laut Banda. Berdasarkan Permen KP No 19 Tahun 2022, estimasi potensi sumber daya ikan di WPP 714 sebesar 1.033.979 ton/tahun meliputi komoditas jenis Ikan Pelagis Kecil, Ikan Pelagis Besar, Ikan Demersal, Ikan Karang, Udang Penaeid, Lobster, Kepiting, Rajungan, Cumi-cumi. Pelabuhan Perikanan Ukur Laran menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat pesisir di Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang bergantung pada sektor perikanan tangkap. Hasil tangkapan ikan dari pelabuhan ini menyuplai kebutuhan protein hewani bagi penduduk Saumlaki dan daerah sekitarnya. Terdapat aktivitas ekonomi seperti penjualan ikan, penyediaan perbekalan nelayan, dan jasa-jasa terkait yang berkembang di sekitar pelabuhan. Pelabuhan ini juga memfasilitasi distribusi hasil laut ke pasar-pasar di wilayah Maluku Tenggara Barat dan daerah lainnya

Aspek Lingkungan:

Pelabuhan berada di kawasan pesisir yang rentan terhadap perubahan lingkungan seperti abrasi pantai, pencemaran laut, dan kerusakan ekosistem laut. Aktivitas di pelabuhan dapat berdampak pada ekosistem terumbu karang dan biota laut lainnya jika tidak dikelola dengan baik. Terdapat upaya pelestarian lingkungan laut oleh komunitas nelayan setempat, seperti program penghijauan terumbu karang dan pengelolaan sampah.

- 6) Pelabuhan Perikanan Merauke terletak di Kota Merauke, Papua. Berikut deskripsi pelabuhan tersebut dari aspek antropologi sosial, ekonomi, dan lingkungan: Aspek Antropologi Sosial:

Pelabuhan ini menjadi pusat aktivitas masyarakat nelayan yang terdiri dari suku-suku asli Papua, seperti suku Marind, Muyu, dan Malind, serta pendatang dari berbagai daerah di Indonesia. Terdapat interaksi sosial yang intens antara nelayan, pedagang ikan, dan pekerja pelabuhan dari latar belakang budaya yang berbeda. Pelabuhan menjadi tempat berbaur dan asimilasi budaya maritim dari berbagai suku di Papua dan pendatang. Pembagian peran gender dalam kegiatan di pelabuhan cenderung lebih terbuka, dengan kaum perempuan juga terlibat dalam aktivitas penangkapan ikan dan perdagangan.

Aspek Ekonomi:

Pelabuhan ini berada di Wilayah Pengelolaan Perikanan Perairan 718 Perairan Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut Timor bagian Timur. Berdasarkan Permen KP No 19 Tahun 2022, estimasi potensi sumber daya ikan di WPP 718 sebesar

2.637.564 ton/tahun meliputi komoditas jenis Ikan Pelagis Kecil, Ikan Pelagis Besar, Ikan Demersal, Ikan Karang, Udang Penaeid, Lobster, Kepiting, Rajungan, Cumi-cumi. Pelabuhan Perikanan Merauke menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat pesisir di Kota Merauke yang bergantung pada sektor perikanan tangkap. Hasil tangkapan ikan dari pelabuhan ini menyuplai kebutuhan protein hewani bagi penduduk Merauke dan daerah sekitarnya. Terdapat aktivitas ekonomi seperti penjualan ikan, penyediaan perbekalan nelayan, dan jasa-jasa terkait yang berkembang di sekitar pelabuhan. Pelabuhan ini juga memfasilitasi distribusi hasil laut ke pasar-pasar di wilayah Papua dan daerah lainnya.

Aspek Lingkungan:

Pelabuhan berada di kawasan pesisir yang rentan terhadap perubahan lingkungan seperti abrasi pantai, pencemaran laut, dan kerusakan ekosistem laut. Aktivitas di pelabuhan dapat berdampak pada ekosistem terumbu karang, hutan bakau, dan biota laut lainnya jika tidak dikelola dengan baik. Terdapat upaya pelestarian lingkungan laut oleh komunitas nelayan setempat, seperti program penghijauan terumbu karang, konservasi hutan bakau, dan pengelolaan sampah.

- 7) Pelabuhan Perikanan Untia terletak di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Berikut deskripsi pelabuhan tersebut dari aspek antropologi sosial, ekonomi, dan lingkungan:

Aspek Antropologi Sosial:

Pelabuhan ini menjadi pusat aktivitas masyarakat nelayan yang berasal dari suku Makassar, Bugis, dan suku-suku lain di Sulawesi Selatan. Terdapat interaksi sosial yang erat antara nelayan, pedagang ikan, dan pekerja pelabuhan yang membentuk ikatan komunitas maritim yang kuat. Pelabuhan menjadi tempat melestarikan budaya dan tradisi nelayan Makassar dan Bugis, seperti upacara adat sebelum melaut dan perayaan hari-hari besar. Pembagian peran gender dalam kegiatan di pelabuhan cenderung tradisional, dengan kaum laki-laki lebih banyak terlibat dalam penangkapan ikan, sementara kaum perempuan berperan dalam pengolahan dan pemasaran hasil tangkapan.

Aspek Ekonomi:

Pelabuhan ini berada di Wilayah Pengelolaan Perikanan Perairan 713 Perairan Selat Makasar, Teluk Bone, Laut Flores, dan Laut Bali. Berdasarkan Permen KP No 19 Tahun 2022, estimasi potensi sumber daya ikan di WPP 713 sebesar 1.073.147 ton/tahun meliputi komoditas jenis Ikan Pelagis Kecil, Ikan Pelagis Besar, Ikan Demersal, Ikan Karang, Udang Penaeid, Lobster, Kepiting, Rajungan, Cumi-cumi. Pelabuhan Perikanan Untia menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat pesisir di Kota Makassar yang bergantung pada sektor perikanan tangkap. Hasil tangkapan ikan dari pelabuhan ini menyuplai kebutuhan protein hewani bagi penduduk Makassar dan daerah sekitarnya. Terdapat aktivitas ekonomi seperti penjualan ikan, penyediaan perbekalan nelayan, dan jasa-jasa terkait yang berkembang di sekitar pelabuhan. Pelabuhan ini juga memfasilitasi distribusi hasil laut ke pasar-pasar di wilayah Sulawesi Selatan dan daerah lainnya.

Aspek Lingkungan:

Pelabuhan berada di kawasan pesisir yang rentan terhadap perubahan lingkungan seperti abrasi pantai, pencemaran laut, dan kerusakan ekosistem laut. Aktivitas di pelabuhan dapat berdampak pada ekosistem terumbu karang dan biota laut lainnya jika tidak dikelola dengan baik. Terdapat upaya pelestarian lingkungan laut oleh komunitas nelayan setempat, seperti program penghijauan terumbu karang dan pengelolaan sampah.

- 8) Pelabuhan Perikanan Daeo Majiko terletak di Pulau Morotai, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara. Pelabuhan ini memiliki peran strategis sebagai pusat kegiatan perikanan tangkap dan penggerak ekonomi masyarakat pesisir di wilayah perbatasan Indonesia bagian timur. Berikut deskripsi pelabuhan tersebut dari aspek antropologi sosial, ekonomi, dan lingkungan:

Aspek Antropologi Sosial:

Pelabuhan Perikanan Daeo Majiko menjadi pusat aktivitas masyarakat nelayan lokal yang mayoritas berasal dari suku Morotai, Tobelo-Galela, serta pendatang dari suku Bugis dan Buton yang telah lama bermukim di kawasan pesisir. Interaksi sosial antara nelayan, pedagang ikan, pekerja pelabuhan, dan pelaku usaha perikanan membentuk jaringan sosial yang kuat berbasis kekerabatan dan gotong royong.

Pelabuhan ini juga berfungsi sebagai ruang pelestarian nilai-nilai budaya maritim masyarakat Maluku Utara, seperti tradisi melaut berbasis kearifan lokal, doa bersama sebelum melaut, serta penghormatan terhadap laut sebagai sumber kehidupan. Pembagian peran gender masih relatif tradisional, di mana laki-laki dominan dalam kegiatan penangkapan ikan dan pengoperasian kapal, sementara perempuan berperan penting dalam penanganan pascapanen, pengolahan ikan skala rumah tangga, dan aktivitas pemasaran di tingkat lokal.

Aspek Ekonomi:

Pelabuhan Perikanan Daeo Majiko berada di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 715 yang meliputi Perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram, dan Teluk Berau. Wilayah ini dikenal memiliki potensi sumber daya ikan yang besar, terutama untuk komoditas ikan pelagis besar dan kecil, ikan demersal, ikan karang, serta komoditas bernilai ekonomi tinggi seperti tuna, cakalang, tongkol, udang, dan cumi-cumi.

Pelabuhan ini menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat pesisir Morotai yang sebagian besar menggantungkan hidupnya pada sektor perikanan tangkap. Aktivitas ekonomi yang berkembang meliputi pendaratan ikan, perdagangan hasil tangkapan, penyediaan perbekalan melaut, perawatan kapal, serta jasa angkut dan distribusi. Hasil perikanan dari PP Daeo Majiko tidak hanya memenuhi kebutuhan konsumsi lokal, tetapi juga didistribusikan ke wilayah lain di Maluku Utara dan berpotensi mendukung ekspor, seiring pengembangan Morotai sebagai kawasan strategis dan sentra perikanan nasional.

Aspek Lingkungan

Pelabuhan Perikanan Daeo Majiko berada di kawasan pesisir dan perairan laut yang relatif masih alami, namun rentan terhadap tekanan lingkungan seperti pencemaran laut, abrasi pantai, serta degradasi ekosistem terumbu karang akibat aktivitas manusia dan perubahan iklim. Aktivitas perikanan dan operasional pelabuhan berpotensi mempengaruhi kualitas perairan dan keberlanjutan sumber daya ikan apabila tidak dikelola secara berkelanjutan.

Di sisi lain, terdapat kesadaran dan upaya pelestarian lingkungan oleh masyarakat nelayan dan pemangku kepentingan setempat, antara lain melalui penerapan praktik penangkapan ikan yang lebih ramah lingkungan, kegiatan pembersihan sampah pesisir, serta dukungan terhadap konservasi ekosistem laut. Upaya-upaya ini menjadi modal penting dalam menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya perikanan dan kelestarian lingkungan laut di Pulau Morotai.

Indikator Kinerja (IK) 3 – Persentase Lokasi pelabuhan yang telah dianalisis terkait kebutuhan pembangunan dan/atau pengembangan pelabuhan perikanan.

Indikator ini menunjukkan jumlah pelabuhan perikanan yang telah dianalisis kebutuhan pembangunan dan/atau pengembangannya. Identifikasi pelabuhan perikanan meliputi:

1. Analisis kebutuhan pembangunan dan/atau pengembangan Pelabuhan perikanan
2. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan/atau pengembangan fasilitas Pelabuhan Perikanan diantaranya studi kelayakan, dokumen lingkungan, KKRL, WKOPP, masterplan, DED
3. Pembahasan dan koordinasi perencanaan jangka panjang dan jangka pendek pembangunan dan/atau pengembangan pelabuhan perikanan

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 132 Tahun 2021 tentang perubahan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 109 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional memuat pengaturan tentang kebijakan pengembangan pelabuhan perikanan nasional dan Rencana lokasi pelabuhan perikanan. Rencana lokasi pelabuhan perikanan terbagi menjadi:

1. Berdasarkan penyelenggara pelabuhan perikanan dan posisi geografis terdapat:
 - a. 642 lokasi pelabuhan perikanan yang dibangun oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dan melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di wilayah laut
 - b. 18 lokasi pelabuhan perikanan yang dibangun oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dan melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di wilayah darat
 - c. 26 lokasi pelabuhan perikanan yang tidak dibangun oleh pemerintah
2. Berdasarkan status pelabuhan perikanan terdapat: 192 lokasi berstatus calon pelabuhan perikanan, 336 lokasi berstatus pelabuhan perikanan, 47 lokasi berstatus pangkalan pendaratan ikan, 42 lokasi berstatus pelabuhan perikanan pantai, 18 lokasi berstatus pelabuhan perikanan Nusantara dan 7 lokasi berstatus pelabuhan perikanan samudera. Seiring adanya perubahan kondisi pelabuhan perikanan dan perubahan kebijakan memerlukan pembaharuan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 132 Tahun 2023. Pertimbangan pembaharuan diantaranya
 - a. Perubahan kebijakan nasional yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029;
 - b. Perkembangan dokumen perencanaan kewilayahan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, meliputi perubahan nomenklatur kabupaten/kota, Integrasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Darat dan Laut;
 - c. Implementasi kebijakan Penangkapan Ikan Terukur dan Penerapan PNBP Pasca Produksi terhadap Pelabuhan Perikanan yang menjadi pelabuhan pangkalan sesuai dengan zona penangkapan ikan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023;
 - d. Peningkatan status Pelabuhan Perikanan yang sebelumnya Calon Pelabuhan Perikanan / Rencana Lokasi Pelabuhan Perikanan

- e. Rencana strategis lain terkait rencana pemerintah pusat maupun pemerintah daerah serta perubahan lingkungan strategis secara global

Dalam rangka penyediaan data untuk pembaharuan kepmen dimaksud, maka diperlukan kegiatan analisa kebutuhan pembangunan/pengembangan pelabuhan perikanan yang telah tercantum/akan diusulkan di RIPPN. Selain itu untuk mendukung kebutuhan analisa, diperlukan juga analisa terkait potensi pengembangan lahan maupun analisa terkait fasilitas pelabuhan perikanan

Indikator Kinerja Lokasi pelabuhan yang telah dianalisis terkait kebutuhan Pembangunan dan/atau pengembangan pelabuhan perikanan pada Triwulan I Tahun 2026 belum dilakukan penghitungan, karena Indikator Kinerja ini ditargetkan tahunan.

Pada Triwulan I Tahun 2026, telah dilaksanakan analisa mengenai kebutuhan Pembangunan pelabuhan perikanan Kuala Cangkoy, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh.

- a. Pada bulan November tahun 2025 telah terjadi musibah banjir yang mengakibatkan kerugian pada nelayan dan kerusakan fasilitas pelabuhan perikanan sebagai berikut:
 - Kerugian nelayan meliputi: 20 unit kapal motor rusak, 9 unit mesin rusak, sarana hilang terbawa arus banjir (25 unit alat tangkap bubu, 20 unit alat pancing, 50 unit fiber tempat ikan kapasitas 220 liter)
 - Kerusakan fasilitas PP Kuala Cangkoy: jalan komplek, dermaga, Gedung administrasi, pos pelayanan terpadu, docking, lantai jemur, pagar, rumah nelayan, pintu gerbang, pasar ikan. Nilai perkiraan kerusakan fasilitas mencapai Rp.3.403.000.000.
- b. Selain terdampak bencana, terdapat permasalahan utama operasional PP Kuala Cangkoy, yaitu:
 - Jetty pada mulut muara belum berfungsi optimal untuk menahan laju sedimentasi
 - Pendangkalan alur masuk pelabuhan
 - Belum tersedia fasilitas SPDN, cold storage, dan pabrik es
 - Volume penerangan di dermaga untuk mendukung kegiatan bongkar ikan di malam hari masih minimal
- c. Dalam rangka optimalisasi operasional dan rehabilitasi fasilitas pasca bencana banjir, diperlukan peningkatan fasilitas berupa:
 - Perpanjangan/rehab dermaga
 - Perpanjangan jetty
 - Pengerukan alur keluar masuk kapal dari dan ke Pelabuhan Perikanan
 - Pembangunan docking
 - Pembangunan fasilitas dan penataan Kawasan
 - Peningkatan jalan lingkungan
 - Pembangunan pagar
- d. Total kebutuhan peningkatan fasilitas sebesar Rp. 45.260.000.000.

Indikator Kinerja (IK) 5 – Persentase pelabuhan dengan tingkat operasional optimum

Persentase pelabuhan perikanan dengan tingkat operasional optimum dihitung berdasarkan capaian tingkat operasional pelabuhan perikanan dibandingkan dengan jumlah pelabuhan perikanan yang tercantum dalam RIPPN. Pelabuhan Perikanan dengan tingkat operasional optimum dilihat dari beberapa aspek meliputi:

- a. Fasilitas minimal pelabuhan perikanan.
- b. Kriteria teknis.
- c. Kriteria operasional.
- d. Kelembagaan.
- e. Sumber Daya Manusia.
- f. Anggaran Operasional.

Analisis tingkat operasional optimum pelabuhan perikanan dilakukan berdasarkan data dari pelabuhan perikanan yang telah teridentifikasi. Penilaian terhadap capaian persentase pelabuhan perikanan dengan tingkat operasional optimum dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek utama, yaitu ketersediaan fasilitas minimal, pemenuhan kriteria teknis, kriteria operasional, kelembagaan, sumber daya manusia (SDM), serta dukungan anggaran operasional.

Pelabuhan perikanan merupakan suatu kawasan yang terdiri atas wilayah daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas tertentu, yang berfungsi sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan sistem bisnis perikanan. Kawasan ini dimanfaatkan sebagai tempat kapal perikanan untuk bersandar, berlabuh, dan melakukan kegiatan bongkar muat hasil tangkapan, serta dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan sarana pendukung lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 132 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional (RIPPN), jumlah pelabuhan perikanan di Indonesia tercatat sebanyak 686 unit. Jumlah tersebut terdiri atas 642 pelabuhan perikanan yang dikelola pemerintah, 18 pelabuhan perikanan pemerintah yang melayani kapal di perairan darat, serta 26 pelabuhan perikanan yang dibangun di luar pemerintah.

Ditinjau dari klasifikasinya, pelabuhan perikanan tersebut terbagi menjadi beberapa kategori, yaitu Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS), Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN), Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP), dan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI), serta status lainnya berupa Pelabuhan Perikanan (PP) dan Calon Pelabuhan Perikanan (CP).

Dari keseluruhan pelabuhan perikanan yang tercantum dalam RIPPN, terdapat 22 pelabuhan perikanan yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Pusat yang tersebar pada beberapa Unit Pelaksana Teknis (UPT) perikanan, sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

No	Nama Pelabuhan	No	Nama Pelabuhan
1	Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta	17	Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat
2	Perikanan Samudera Kendari	18	Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan
3	Perikanan Samudera Cilacap	19	Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat
4	Perikanan Samudera Bungus	20	Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu
5	Perikanan Samudera Belawan	21	Pelabuhan Perikanan Nusantara Kwandang
6	Perikanan Samudera Bitung	22	Pelabuhan Perikanan Nusantara Merauke
7	Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga	23	Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang
8	Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon	24	PP/SKPT Cikidang
9	Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan	25	PP/SKPT Teluk Awang
10	Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu	26	PP/SKPT Daeo Majiko Morotai
11	Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan	27	PP/SKPT Saumlaki
12	Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate	28	PP/SKPT Merauke
13	Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	29	PP/SKPT Natuna
14	Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	30	PP/SKPT Sebatik
15	Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjung Pandan	31	PP/SKPT Untia
16	Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual		

Operasionalisasi Pelabuhan Perikanan dapat berjalan optimal apabila dukungan fasilitasnya tersedia dan memadai. Fasilitas pelabuhan perikanan meliputi fasilitas pokok, fasilitas fungsional dan fasilitas penunjang

Tabel 1. Fasilitas Pelabuhan

No	Nama Pelabuhan Perikanan	Fasilitas										Pos Jaga (m ²)	MCK (unit)
		Lahan (ha)	Dermaga (m)	Kolam (ha)	Jalan (m)	Drainase (m)	Kantor (m ²)	TPI (m ²)	Air Bersih (liter)	Listrik (Genset) (kVA)	Listrik (PLN) (kVA)		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11
1	PPS Belawan	54,95	301	15	25.112	1.489	856	800	2.000	30	300	10	
2	PPS Bitung	4,64	707	20	826	2.765	605	1.826	30		250	24	
3	PPS Bungus	17,62	750	33	889	220	873	590			550	35	
4	PPS Cilacap	30,70	2.646	16	16.600	3.765	993	1.684	90	250	197	25	
5	PPS Kendari	40,53		42	29.945	7.059	1.326	1.030	444		1.110	45	
6	PPS Nizam Zachman	70,00	2.577	39	83.100	16.972	3.331	3.350	444 m ³ /hari		850	57	
7	PPN Ambon	3,53	498	2	2.600	300	1.113	500	2.000		170	20	
8	PPN Brondong	19,93	526	23	23.465	3.852	1.436	1.080	248 KL/bulan		345	24	
9	PPN Karangantu	2,50	760	1	4.047	880	322	450	10.000		237	16	
10	PPN Kejawanan	75,19	559	6	2.510	3.804	300	2.287	200 L/hari		106	36	
11	PPN Kwandang	2,97	250	5	3.536	300	375	375	30		505	70	
12	PPN Palabuhanratu	43,00	400	2		528	920	400.000			95	12	
13	PPN Pekalongan	36,36	346	2	9.626	1.500	513	3.704	-		100	30	
14	PPN Pemangkat	6,25	373	0	13.486	5.900	453	558	2.000		275	20	
15	PPN Pengambengan	19,20	395	30	13.815	1.738	1.170	1.361	134		309	27	
16	PPN Priji	4,78	552	15	12.445	2.275	655	1.552	-		56.600	18	
17	PPN Sibolga	15,00	347	8	900	2.814	864	1.134	16		135	16	
18	PPN Sungailiat	44,91	360	1	1.280	700	862	450	6		305	24	
19	PPN Tanjungpandan	4,98	1.222	0	7.257	588	300						
20	PPN Ternate	10,60	340	1	2.834	1.815	416	288	15		200	46	
21	PPN Tual	16,80	300	1	994	2.454	565	462	163		60	36	
22	PPP Teluk Batang	5,94	2.034	3	3.342		262	450	709		125	36	
23	PPN Merauke SKPT Merauke	27,84	287	0	1.645	450	700	375	60 m ³ /hari	220	131	24	2
24	PP Cikidang	5,20	35	11	1.224	882	180	417		Tdk berfungsi	60	9	2
25	PP Daao Majiko SKPT Morotai	5,22			6.832		480	380	Sumur Bor	210	1.035	4	1
26	PP Ukurlaran SKPT Saumlaki	2,12	220	2	815	496	375	300	950.000	250	555	26	6
27	PP Sebatik SKPT Sebatik	0,67	5.250		560	80	180	150	30 Kubik	600	246	12	2
28	PP Selat Lampa SKPT Natuna	5,8	1.760		1.183	1.183	150	800			180	21	2
29	PP Teluk Awang	9,80	245	48	1.534	2.161	1.008	240	48.000 / bulan	(Tidak Berfungsi dengan	53.000	60	-
30	PP Teluk Sinabang (Siemeuleue)	2,00	50		801		974	317	60.000	200		6	1
31	PP Untia	8,36	152		2.676	1.335	420	800		500	240.000	6	1

Tabel 2. Operasional Produksi Perikanan

No	Nama Pelabuhan Perikanan	Produksi (Ton)					Nilai Produksi (Rp.)				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
1	PPS Belawan	16.357,86	12.774,81	19.122,75	11.108,00	19.091,58	475.609.598.000,00	456.920.474.000,00	448.378.185.976,00	168.387.158.707,00	344.312.776.672,00
2	PPS Bitung	45.912,99	54.942,53	46.804,63	61.470,68	87.539,02	1.131.763.626.024,00	1.489.090.978.765,00	1.062.978.341.280,00	1.165.465.791.434,00	1.973.685.780.000,00
3	PPS Bungus	5.514.473,00	5.867,28	7.467,48	8.279,37	9.546,42	104.967.218.880,00	107.303.640.882,00	107.372.127.238,00	92.572.650.500,00	107.576.735.500,00
4	PPS Cilacap	19.789,62	22.561,79	26.550,48	37.114,51	37.838,69	484.650.193.515,00	640.456.859.796,00	607.027.217.069,00	732.067.456.157,00	1.035.603.299.489,00
5	PPS Kendari	17.250,46	22.341,10	17.834,17	14.729,19	1.161,57	364.281.033.000,00	474.311.541.790,00	319.685.150.200,00	262.528.486.960,00	215.429.289.489,00
6	PPS Nizam Zachman	161.065,81	130.167,76	197.649,69	284.615,43	321.011,50	4.171.604.090.550,00	16.278.103.987.265,00	3.607.676.791.606,00	3.275.937.446.009,00	7.726.976.837.213,00
7	PPN Ambon	2.892,29	2.283,51	3.264,88	4.323,85	3.251,67	62.993.582.430,00	45.671.287.000,00	49.575.271.816,00	79.530.120,84	91.518.341.839,00
8	PPN Brondong	53.232,32	25.956,35	30.244,04	55.747,79	57.502,61	935.588.348.773,00	546.548.605.260,00	2.799.789.391.690,00	1.046.539.135.562,00	1.079.415.322.480,00
9	PPN Karangantu	1.359,68	834,51	1.031,80	2.891,79	2.638,51	19.336.939.402,00	14.234.016.886,00	15.579.767.798,00	38.595.183.121,00	36.750.887.500,00
10	PPN Kejawanan	9.494,61	7.526,64	5.643,52	10.352,45	11.624,69	648.902.999.799,00	563.903.929.400,00	376.783.687.150,00	820.899.005.629,00	778.905.265.107,00
11	PPN Kwandang	5.763,59	5.867,19	5.185,00	6.230,36	6.394,02	116.982.650.409,00	115.769.039.004,00	86.125.859.262,96	97.196.887.390,00	117.861.576.493,00
12	PPN Palabuhanratu	9.131,70	6.499,75	7.916,47	10.806,90	7.295,42	191.972.330.590,00	132.644.888.357,00	154.175.729.116,00	208.352.811.530,00	160.889.540.956,00
13	PPN Pekalongan	11.240,26	12.847,83	13.434,28	13.863,54	8.481,15	12.610.756.712.241,00	218.747.891.789,76	246.530.459.421,00	197.371.970.215,00	161.773.029.936,00
14	PPN Pemangkat	9.451,53	8.452,59	13.239,33	11.000,26	12.499,51	167.229.396.500,00	130.741.133.016,00	180.162.080.099,00	11.000.260,70	212.923.128.996,00
15	PPN Pengambengan	13.972,88	13.018,79	9.243,82	23.046,43	21.098,86	71.042.151.934,00	82.509.549.700,00	61.101.868.700,00	110.876.551.450,00	147.788.050.600,00
16	PPN Priji	23.271,79	12.495,66	16.727,60	21.183,44	12.149,36	226.461.084.006,00	139.550.508.621,00	161.592.656.416,00	167.083.644.498,00	131.997.392.715,00
17	PPN Sibolga	25.600,08	20.574,51	31.183,58	37.074,63	29.871,60	385.062.243.640,00	417.420.795.092,00	228.601.312.128.965,00	610.336.130.657,00	538.656.472.499,00
18	PPN Sungailiat	5.107,81	4.267,34	4.660,20	3.025,74	3.943,18	139.937.775.169,00	115.432.100.581,00	147.606.293.188,00	87.163.548.500,00	124.414.153.438,00
19	PPN Tanjungpandan	12.326,41	7.910,99	3.635,27	4.097,24	6.764,93	648.913.226.039,60	380.784.548.204,10	132.010.302.380,00	140.161.049.001,00	289.946.555.000,00
20	PPN Ternate	3.708,63	3.707,80	3.907,07	5.097,29	4.153,95	111.615.431.040,00	109.774.468.892,00	97.377.020.000,00	144.896.988.195,00	111.212.684.229,00
21	PPN Tual			970,24	1.241,40	1.470,35			12.665.571.000,00	22.609.812.900,00	28.926.375.524,00
22	PPP Teluk Batang	1.580,45	1.600,88	649,21	226,14	253,02	45.598.067.900,00	41.254.283.000,00	15.471.265.000,00	5.738.995.578,00	6.269.023.696,00
23	PPN Merauke SKPT Merauke	4.089,97	1.953,33	3.621,44	2.533,78	4.975,81	148.733.643.800,00	70.128.998.000,00	83.640.066.390,80	28.615.359.829,90	47.623.717.500,00
24	PP Cikidang	664,36	576,26	1.391,00	1.144,00	835,00	26.777.022.400,62	20.904.351.753,58	31.000.000.000,00	31.000.000.000,00	31.000.000.000,00
25	PP Daao Majiko SKPT Morotai	623,83	449,00	1.066,04	1.387,76					65.810.879.000,00	
26	PP Ukurlaran SKPT Saumlaki	5.004,04	3.502,61	3.796,00		160,80	98.368.678.570,00	74.854.132.880,00	140.539.960.530,00		2.219.430.000,00
27	PP Sebatik SKPT Sebatik	12.505,86	10.475,29	803.179,00	1.026.367,00	43.605,00	614.147.238.000,00	582.391.501.000,00	24.621.903.000,00	20.007.608.400,00	13.326.159.600,00
28	PP Selat Lampa SKPT Natuna	1.318,15	988,81	2.363,13	921,14	3.126.984,00	24.843.281.400,00	19.111.698.000,00	41.779.063.250,00	18.908.214.000,00	59.401.745.000,00
29	PP Teluk Awang	3.107.443,00	2.702.795,00	6.192.806,00	1.248.116,00	3.626.606,00	42.627.458.550,00	44.642.463.331,00	98.581.445.800,00	17.967.548.947,00	43.101.579.000,00
30	PP Teluk Sinabang (Siemeuleue)	274,14	115,90	269,07	278,64	420,72	3.378.574.000,00	2.019.375.998,00	2.737.410.000,00	2.251.629.911,70	5.619.950.000,00
31	PP Untia	5.625,91	2.951,90	948,12	332,19	344.311,00	92.962.781.250,00	42.887.454.075,00	19.395.550.500,00	4.473.257.476,00	11.390.467.241,00

Berdasarkan data fasilitas pelabuhan perikanan yang disajikan, dapat diketahui bahwa ketersediaan sarana dan prasarana masih menunjukkan variasi antar pelabuhan, baik dari sisi kapasitas maupun kelengkapan fasilitas pendukung.

Secara umum, fasilitas dasar seperti lahan, dermaga, kolam pelabuhan, dan jalan akses merupakan komponen utama dalam mendukung operasional pelabuhan. Ketersediaan dan kapasitas fasilitas ini sangat penting menentukan kelancaran aktivitas sandar kapal, bongkar muat hasil perikanan, serta distribusi logistik. Pelabuhan dengan luas lahan dan panjang dermaga

yang memadai cenderung memiliki tingkat aktivitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan pelabuhan yang kapasitasnya terbatas.

Dari sisi fasilitas penunjang, seperti drainase, kantor operasional, Tempat Pelelangan Ikan (TPI), serta penyediaan air bersih dan listrik, juga menjadi faktor penting dalam menunjang pelayanan pelabuhan. Ketersediaan listrik, baik dari genset maupun PLN, menunjukkan bahwa sebagian pelabuhan telah memiliki dukungan energi yang cukup untuk operasional, meskipun masih terdapat variasi kapasitas daya yang dapat mempengaruhi optimalisasi layanan.

Selain itu, fasilitas pendukung lainnya seperti pos jaga dan MCK juga berperan dalam menjaga keamanan, kenyamanan, serta standar pelayanan minimum di pelabuhan. Keberadaan fasilitas ini, meskipun terlihat sederhana, menjadi indikator penting dalam menilai kelayakan operasional suatu pelabuhan.

Namun demikian, dari data yang tersedia terlihat bahwa belum seluruh pelabuhan memiliki kelengkapan fasilitas yang memadai sesuai standar operasional optimum. Beberapa fasilitas masih terbatas baik dari sisi jumlah maupun kapasitas, yang berpotensi menghambat efisiensi pelayanan dan aktivitas ekonomi di pelabuhan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ketersediaan fasilitas pelabuhan perikanan masih perlu ditingkatkan, khususnya pada aspek fasilitas dasar dan penunjang yang berpengaruh langsung terhadap kelancaran operasional. Upaya peningkatan dan pemerataan fasilitas menjadi penting guna mendorong tercapainya tingkat operasional pelabuhan yang lebih optimal.

Berdasarkan data produksi (ton) dan nilai produksi (rupiah) pelabuhan perikanan periode 2021–2025, terlihat bahwa kinerja pelabuhan perikanan di Indonesia menunjukkan variasi yang cukup signifikan antar pelabuhan, baik dari sisi volume produksi maupun nilai ekonominya

Secara umum, pelabuhan dengan kelas lebih tinggi seperti Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) menunjukkan kontribusi produksi dan nilai produksi yang jauh lebih besar dibandingkan dengan pelabuhan kelas lainnya. Hal ini tercermin pada beberapa pelabuhan utama, seperti PPS Nizam Zachman, yang secara konsisten menjadi pelabuhan dengan produksi dan nilai produksi tertinggi. Produksi di pelabuhan ini menunjukkan tren meningkat, terutama pada tahun 2024–2025, yang diikuti dengan lonjakan nilai produksi yang sangat signifikan. Kondisi ini menunjukkan peran strategisnya sebagai pusat kegiatan perikanan skala nasional.

Selain itu, PPS Bitung dan PPS Cilacap juga menunjukkan kinerja yang kuat dengan tren produksi dan nilai produksi yang relatif stabil dan cenderung meningkat. Pelabuhan-pelabuhan ini menjadi kontributor utama dalam mendukung produksi perikanan tangkap nasional

Pada kelompok Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN), terdapat beberapa pelabuhan dengan kinerja menonjol seperti PPN Brondong, PPN Sibolga, dan PPN Kejawan.

Pelabuhan-pelabuhan ini menunjukkan volume produksi yang cukup tinggi serta nilai produksi yang signifikan, meskipun cenderung lebih fluktuatif dibandingkan PPS. Fluktuasi ini dapat dipengaruhi oleh faktor musim penangkapan, kondisi sumber daya ikan, serta aktivitas operasional kapal.

Di sisi lain, beberapa pelabuhan seperti PPN Karangantu, PPN Ternate, dan PPN Tual menunjukkan produksi dan nilai produksi yang relatif rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa pelabuhan tersebut belum beroperasi secara optimal, baik dari sisi kapasitas fasilitas, jumlah armada yang dilayani, maupun keterhubungan dengan pasar.

Untuk pelabuhan dengan skala lebih kecil seperti PPP dan PP, produksi dan nilai produksi umumnya lebih rendah dan cenderung tidak stabil. Beberapa pelabuhan bahkan menunjukkan penurunan produksi pada tahun-tahun tertentu, yang mengindikasikan adanya keterbatasan dalam aktivitas operasional maupun dukungan infrastruktur.

Jika dilihat dari tren waktu, sebagian besar pelabuhan menunjukkan pola fluktuatif, dengan kenaikan dan penurunan produksi yang dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti musim penangkapan, kondisi cuaca, serta dinamika pasar. Namun demikian, pelabuhan besar cenderung lebih stabil karena didukung oleh fasilitas yang lebih lengkap dan jaringan distribusi yang lebih kuat.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa:

- Kontribusi produksi dan nilai produksi masih terkonsentrasi pada pelabuhan besar (PPS dan sebagian PPN)
- Terdapat kesenjangan kinerja antar pelabuhan
- Banyak pelabuhan yang masih memiliki potensi untuk ditingkatkan menuju kondisi operasional optimum

Dengan demikian, diperlukan upaya peningkatan yang terarah, terutama pada pelabuhan dengan kinerja rendah, melalui penguatan fasilitas, peningkatan layanan, serta integrasi dengan rantai pasok perikanan agar dapat meningkatkan produksi dan nilai tambah secara berkelanjutan

Indikator Kinerja Persentase pelabuhan perikanan dengan tingkat operasional optimum pada Triwulan I Tahun 2026 belum dilakukan penghitungan, karena Indikator Kinerja ini ditargetkan tahunan.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

1. Penetapan kelas pelabuhan perikanan.

Tidak ada penetapan kelas pelabuhan perikanan pada periode Triwulan I Tahun 2026.

2. Kegiatan pengelolaan pelabuhan perikanan melalui penilaian SELARASKAN pada Triwulan I Capaian implementasi SELARASKAN bulan Januari s.d Maret 2026 yang dievaluasi pada bulan April 2026 dengan skor setelah koreksi *evidence* oleh Tim Evaluasi SELARASKAN sebagai berikut:

NO	NAMA PELABUHAN	2026			SKOR KUMULATIF	SKOR RATA-	KETERANGAN
		JAN	FEB	MAR		RATA	
1	PPN Pemangkat	96,42	94,98	95,67	287,06	95,69	Sangat Baik
2	PPN Sibolga	93,45	92,12	90,65	276,22	92,07	Sangat Baik
3	PPN Tanjung Pandan	91,22	91,17	93,44	275,83	91,94	Sangat Baik
4	PPN Kejawan	86,27	86,37	89,85	262,48	87,49	Sangat Baik
5	PPS Cilacap	85,85	86,12	88,84	260,82	86,94	Sangat Baik
6	PPN Kwandang	85,38	86,72	84,91	257,01	85,67	Sangat Baik
7	PPN Pengambengan	86,54	85,28	84,24	256,06	85,35	Sangat Baik
8	PPN Prigi	88,09	79,53	86,19	253,81	84,6	Sangat Baik
9	PPN Ternate	80,75	85,31	85,94	252	84	Sangat Baik
10	PPN Palabuhan Ratu	78,86	83,72	82,02	244,6	81,53	Sangat Baik
11	PPN Sungai Liat	83,25	80,19	80,96	244,4	81,47	Sangat Baik
12	PPS Bungus	75,5	82,82	82,51	240,83	80,28	Sangat Baik
13	PPP Teluk Batang	78,44	80,04	82,21	240,7	80,23	Sangat Baik
14	PPN Ambon	81,39	80,29	77,73	239,41	79,8	Baik
15	PPN Pekalongan	76,52	77,82	69,29	223,63	74,54	Baik
16	PPS Nizam Zachman	78,08	72,91	69,54	220,53	73,51	Baik
17	PPS Bitung	66,41	76,44	69,13	211,98	70,66	Baik
18	PPN Karangantu	56,01	71,01	77,97	204,99	68,33	Cukup
19	PPN Tual	58,2	68,23	74,71	201,14	67,05	Cukup
20	PPS Kendari	80,36	70,87	49,86	201,09	67,03	Cukup
21	PPS Belawan	67,29	60,26	68,81	196,36	65,45	Cukup
22	PPN Brondong	0	0,01	9,44	9,46	4,73	Kurang

Dari tabel diatas, 13 Pelabuhan mendapatkan penilaian Sangat Baik dengan rentang nilai tertinggi PPN Pemangkat dengan skor 95,69, dan terendah PPP Teluk Batang dengan skor 80,23. Selanjutnya, 4 pelabuhan mendapatkan penilaian Baik dengan rentang nilai 79,8-70,66. Berikutnya 4 pelabuhan mendapatkan penilaian Cukup dengan rentang nilai 68,33-65,45. Terakhir, 1 pelabuhan mendapatkan nilai kurang yaitu PPN Brondong, dengan nilai 4,73.

Selain kegiatan-kegiatan diatas, Beberapa kegiatan lain yang mendukung Indikator Kinerja ini yaitu:

1. Sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001 di Pelabuhan Perikanan sebagai bagian dari penguatan tata kelola lingkungan. Pada tahun 2026 akan dilaksanakan sertifikasi baru ISO 14001:2015 pada 2 pelabuhan perikanan dan sertifikasi ulang ISO 14001:2015 pada 9 lokasi Pelabuhan Perikanan yang saat ini sedang memasuki tahapan proses penyiapan peninjauan lapangan.

2. Berperan aktif dalam penyusunan berbagai regulasi strategis di bidang lingkungan antara lain:
 - Rancangan Peraturan Presiden tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah;
 - Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Laut Sehat Bebas Sampah (SEBASAH);
 - Rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Peta Jalan Adaptasi Perubahan Iklim Sektor Kelautan dan Perikanan
3. Direktorat Kepelabuhanan Perikanan menjadi bagian dari Tim Verifikasi Pusat untuk Penilaian Penghargaan Pelabuhan dan Bandar Udara Sehat (PBUS) tingkat nasional Tahun 2026, yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan, serta melakukan pendampingan kepada pelabuhan perikanan yang ikut serta dalam kegiatan PBUS 2026 yaitu:
 - 1) PPS Nizam Zachman Jakarta
 - 2) PPN Karangantu
 - 3) PPN Palabuhanratu
 - 4) PPN Kwardang
 - 5) PPN Sungailiat
 - 6) PPN Prigi
 - 7) PPN Ambon
 - 8) PPN Tual
 - 9) PPN Ternate
4. Pada tahun 2026 akan dilaksanakan penyusunan beberapa dokumen standar berupa Peraturan Direktur Jenderal sebagai implementasi teknis Standar Eco Fishing Port terkait:
 - 1) Pedoman Penilaian Kinerja Lingkungan di Pelabuhan Perikanan
 - 2) Pedoman Penilaian Keamanan dan Ketertelusuran Ikan yang Didaratkan di Pelabuhan Perikanan
 - 3) Penyusunan dokumen Sistem Manajemen Pengamanan (SMP) PPS Kendari
5. Pada kegiatan Obvitnas Pelabuhan Perikanan tahun 2026, akan direncanakan sertifikasi Sistem Manajemen Pengamanan Obvitnas pada PPS Cilacap dan Pelaksanaan Wasdal Sistem Manajemen Pengamanan Obvitnas di PPS Bitung.

Indikator Kinerja (IK) 6 – Tingkat pelayanan di pelabuhan perikanan

Tingkat pelayanan Perusahaan Pelabuhan Perikanan merupakan lama waktu pelayanan pada jasa Kepelabuhanan Perikanan (JKP) dan pelayanan pengendalian lingkungan (JPL) di Pelabuhan Perikanan UPT Pusat sebanyak 22 Pelabuhan Perikanan.

Indikator Kinerja Persentase pelabuhan perikanan dengan tingkat operasional optimum pada Triwulan I Tahun 2026 belum dilakukan penghitungan, karena Indikator Kinerja ini ditargetkan

tahunan. Beberapa kegiatan yang telah terlaksana pada Triwulan I Tahun 2026 yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. Capaian jasa kepelabuhanan Januari hingga Maret 2026

PENDAPATAN PNBP PELABUHAN PERIKANAN	TARGET(Rp)	REALISASI(Rp)		
		Januari	Februari	Maret
239146 - PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KARANGANTU	1.287.313.000	75.693.038	109.679.651	106.059.942
425122 - Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	-	-	-
425131 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	97.638.000	3.839.400	27.381.915	-
425151 - Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	786.120.000	44.202.738	53.308.096	58.747.779
425621 - Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan	403.555.000	27.650.900	28.989.640	47.312.163
239171 - PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEKALONGAN	794.106.000	39.025.558	26.680.790	70.992.673
425122 - Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	-	-	41.466.600
425151 - Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	-	500.000	-	-
425621 - Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan	794.106.000	37.700.540	26.680.790	29.526.073
425911 - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	825.018	-	-
239214 - PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SUNGAILIAT	713.505.000	92.479.757	497.812.063	45.247.085
425131 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	48.977.000	44.468.000	447.645.000	-
425151 - Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	186.584.000	14.163.000	17.606.750	12.840.000
425621 - Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan	477.944.000	32.553.574	32.560.313	32.407.085
425911 - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	475.183	-	-
425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	820.000	-	-
239221 - PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TANJUNG PANDAN	1.512.741.000	191.903.430	129.351.459	124.606.513
425131 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	410.256.000	-	-	-
425151 - Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	151.794.000	7.309.000	5.262.500	4.275.000
425621 - Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan	950.691.000	184.594.430	124.088.959	120.331.513
425911 - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-	-	-
239235 - PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TELUK BATANG	320.000.000	20.100.468	21.678.347	16.208.275
425131 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	78.474.000	-	-	-
425151 - Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	81.192.000	9.990.220	10.168.280	6.852.390
425621 - Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan	160.334.000	10.110.248	11.510.067	9.355.885
239991 - PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEMANGKAT	1.010.140.000	74.917.741	43.643.742	49.701.982
425131 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	4.547.000	1.904.690	-	-
425151 - Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	10.025.000	1.108.925	900.000	2.700.000
425621 - Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan	995.568.000	71.904.126	42.743.742	47.001.982
310719 - PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KWANDANG	1.270.622.000	117.277.381	74.287.083	92.040.799
425151 - Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	975.402.000	92.041.301	48.905.500	70.733.999
425621 - Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan	295.220.000	25.236.080	23.723.370	21.306.800
425911 - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-	1.658.213	-
427655 - PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BELAWAN	1.179.178.000	141.737.995	414.062.984	74.431.150
425122 - Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	-	63.679.460	-
425131 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	2.730.000	-	285.413.000	-
425151 - Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	533.721.000	61.878.300	909.000	5.000.000
425621 - Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan	642.727.000	79.637.695	64.061.524	69.183.667
425911 - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	222.000	-	247.483
427661 - PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TERNATE	2.369.031.000	233.477.031	187.284.309	143.901.972
425131 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	210.250.000	-	-	-
425151 - Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	733.550.000	97.434.934	58.755.506	32.862.826
425621 - Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan	1.425.231.000	133.891.646	128.528.803	111.039.146
425911 - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	2.150.451	-	-
427670 - PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PRIGI	1.601.272.000	119.811.620	88.891.244	85.673.236
425131 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	203.433.000	28.723.750	13.785.000	-
425151 - Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	594.283.000	41.053.832	32.197.930	28.089.550
425621 - Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan	803.556.000	50.034.038	42.908.314	57.583.686
427692 - PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA BRONDONG	2.345.121.000	436.415.915	915.767.475	145.143.032
425131 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	-	280.874.000	746.975.000	-
425151 - Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	1.053.121.000	9.554.376	36.655.949	1.451.596
425621 - Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan	1.292.000.000	143.485.239	132.136.526	143.691.436
425911 - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	2.502.300	-	-
518117 - PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP	3.492.404.000	302.726.516	474.654.934	524.635.682
425131 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	1.527.500.000	-	-	-
425151 - Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	125.369.000	52.403.645	135.288.850	114.000.082
425621 - Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan	1.839.535.000	250.094.871	339.366.084	410.635.600
425911 - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	228.000	-	-
531488 - PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS	2.227.893.000	85.731.015	201.664.012	284.541.504
425131 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	29.568.000	5.000.000	13.971.000	182.565.000
425132 - Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	-	9.176.625	-	-
425151 - Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	376.725.000	1.799.000	3.692.659	325.000
425621 - Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan	1.821.600.000	69.755.390	184.000.353	101.651.504

PENDAPATAN PNBP PELABUHAN PERIKANAN	TARGET(Rp)	REALISASI(Rp)		
		Januari	Februari	Maret
537611 - PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA NIZAM ZACHMAN	29.075.265.000	2.041.530.028	3.064.713.380	2.255.497.836
425131 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	-	-	294.761.000	-
425151 - Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	102.705.000	20.370.885	-	10.797.032
425621 - Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan	28.972.560.000	2.018.202.073	2.769.952.380	2.244.700.804
425911 - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	2.940.350	-	-
425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	16.720	-	-
537695 - PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI	7.745.416.000	625.516.623	662.786.589	686.141.011
425131 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	89.679.000	83.872.461	97.568.755	70.462.999
425132 - Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	899.000	-	-	-
425151 - Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	2.439.762.000	85.383.667	64.597.338	155.938.039
425621 - Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan	5.215.076.000	453.133.323	500.620.496	459.739.973
425911 - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	3.127.172	-	-
560393 - PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PELABUHAN RATU	1.176.293.000	397.133.429	96.412.980	78.757.229
425131 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	252.785.000	233.155.592	-	-
425132 - Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	-	-	-	-
425151 - Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	89.241.000	51.363.485	4.396.932	8.398.237
425621 - Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan	834.267.000	112.092.952	92.016.048	70.358.992
425911 - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	521.400	-	-
560401 - PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SIBOLGA	2.610.358.000	945.519.276	249.733.019	90.511.538
425131 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	688.283.000	814.935.000	126.391.000	-
425151 - Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	284.623.000	8.760.194	12.713.668	9.439.168
425621 - Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan	1.637.452.000	121.734.582	110.628.351	81.072.370
425911 - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	37.000	-	-
425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	52.500	-	-
622461 - PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA AMBON	1.058.270.000	293.516.009	193.541.774	193.048.904
425122 - Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	98.777.000	-	-
425131 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	305.000.000	-	-	-
425151 - Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	191.720.000	27.037.430	23.898.861	19.008.105
425621 - Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan	561.550.000	166.850.849	169.642.913	174.040.799
425911 - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	850.730	-	-
622475 - PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TUAL	550.150.000	44.846.341	123.651.793	53.708.645
425131 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	1.500.000	-	67.623.520	550.000
425151 - Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	290.000.000	-	16.831.500	1.100.000
425621 - Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan	258.650.000	44.846.341	39.196.773	52.058.645
622482 - PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN	6.587.855.000	1.038.944.882	735.693.993	725.456.259
425131 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	599.802.000	478.214.468	16.091.000	-
425133 - Pendapatan Sewa Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	39.547.522	-	-
425151 - Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	15.365.000	500.000	-	-
425621 - Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan	5.972.688.000	520.682.892	719.602.993	725.456.259
425911 - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-	-	-
633693 - PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PENGAMBENGAN	790.511.000	57.799.662	46.362.314	30.837.890
425131 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	35.000.000	3.235.000	3.301.000	3.412.000
425151 - Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	275.131.000	6.325.000	2.566.990	334.000
425621 - Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan	480.380.000	44.229.429	40.494.324	27.091.890
425911 - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	4.010.233	-	-
633707 - PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BITUNG	2.783.856.000	304.635.436	372.453.414	338.299.381
425131 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	123.805.000	-	10.419.000	-
425151 - Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	126.051.000	24.399.233	51.291.127	27.996.876
425621 - Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan	2.534.000.000	280.236.203	310.743.287	310.302.505
Grand Total	145.002.600.000	15.361.478.302	17.461.614.698	12.430.885.076

Berdasarkan data pada tabel 1 disampaikan total target PNBP pelabuhan perikanan tahun 2026 sebesar Rp72.501.300.000. Sampai dengan akhir Maret, realisasi PNBP mencapai sekitar Rp22,63 miliar atau 31,2% dari target tahunan.

Secara bulanan, realisasi PNBP tercatat sebesar Rp7,68 miliar pada bulan Januari, kemudian meningkat menjadi Rp8,73 miliar pada bulan Februari, dan selanjutnya mengalami penurunan menjadi Rp6,21 miliar pada bulan Maret.

Analisis Tren Realisasi

Peningkatan realisasi pada bulan Februari menunjukkan adanya perbaikan aktivitas operasional pelabuhan, terutama pada jasa pelabuhan perikanan sebagai kontributor utama, serta

didukung oleh Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan. Namun demikian, penurunan pada bulan Maret mengindikasikan adanya fluktuasi kegiatan pelayanan, yang dapat dipengaruhi oleh penurunan aktivitas jasa pelabuhan, faktor musiman, atau kemungkinan kendala dalam proses penagihan dan pencatatan PNBP.

Secara umum, tren Triwulan I belum menunjukkan pola pertumbuhan yang stabil sehingga memerlukan perhatian dalam pengendalian kinerja, khususnya pada optimalisasi layanan utama seperti jasa pelabuhan, pemanfaatan fasilitas, serta sumber pendapatan lainnya pada bulan-bulan berikutnya.

Analisis Kinerja Pelabuhan

Kinerja antar pelabuhan menunjukkan variasi yang cukup signifikan. Beberapa pelabuhan besar mampu memberikan kontribusi tinggi dan relatif stabil, sementara sebagian lainnya masih menunjukkan realisasi yang rendah atau fluktuatif.

Pelabuhan dengan kinerja terbaik antara lain:

- **PPS Nizam Zachman Jakarta**, sebagai kontributor terbesar dengan realisasi tinggi dan stabil
- **PPS Kendari**, dengan tren peningkatan yang konsisten
- **PPN Kejawan**, dengan kontribusi signifikan dan stabil

Sebaliknya, beberapa pelabuhan masih menunjukkan kinerja yang relatif rendah, seperti:

- PPN Pemangkat
- PPN Karangantu
- PPN Tual

Diharapkan peningkatan kinerja terkait pnbp pada Pelabuhan perikanan yang masih rendah.

Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis realisasi PNBp pelabuhan perikanan sampai dengan Triwulan I, dapat disimpulkan bahwa kinerja secara umum menunjukkan capaian yang cukup baik, dengan realisasi sebesar 31,2% dari target tahunan. Capaian ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan kegiatan operasional pelabuhan masih berjalan, meskipun belum sepenuhnya optimal.

Dari sisi tren, realisasi mengalami peningkatan pada bulan Februari yang mencerminkan perbaikan aktivitas layanan, khususnya pada jasa pelabuhan perikanan sebagai kontributor utama. Namun demikian, terjadi penurunan pada bulan Maret yang menunjukkan adanya fluktuasi kinerja, baik akibat faktor operasional, musiman, maupun kemungkinan kendala dalam proses administrasi seperti penagihan dan pencatatan.

Dari aspek kinerja pelabuhan, terdapat kesenjangan yang cukup jelas antar unit pelaksana teknis (UPT). Beberapa pelabuhan besar seperti PPS Nizam Zachman, PPS Kendari, dan PPN Kejawan menunjukkan kinerja yang tinggi dan stabil, sehingga berperan sebagai penyumbang utama PNBp. Di sisi lain, masih terdapat pelabuhan dengan realisasi rendah atau

tidak konsisten, yang menunjukkan bahwa potensi pendapatan belum dimanfaatkan secara optimal.

Dari struktur pendapatan, PNBP masih didominasi oleh jasa pelabuhan perikanan, yang menjadi tulang punggung penerimaan di hampir seluruh pelabuhan. Sementara itu, kontribusi dari pemanfaatan sarana dan prasarana serta sewa aset masih relatif terbatas dan belum merata, sehingga menunjukkan adanya peluang besar untuk optimalisasi dan diversifikasi sumber pendapatan.

Secara keseluruhan, kinerja Triwulan I memberikan gambaran bahwa meskipun capaian sudah beradapada jalur yang cukup baik, masih diperlukan upaya perbaikan yang berfokus pada:

- peningkatan konsistensi realisasi dan evaluasi setiap bulan
- optimalisasi kinerja pelabuhan dengan capaian rendah
- serta pengembangan sumber pendapatan di luar jasa pelabuhan

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan kinerja PNBP pada triwulan berikutnya dapat lebih stabil, merata, dan mampu mencapai target yang telah ditetapkan secara optimal.

Adapun kesimpulan dari analisis data pelayanan jasa kepelabuhanan yakni :

- Realisasi PNBP Triwulan I mencapai **31,2% dari target**, menunjukkan kinerja cukup baik namun belum optimal.
- Tren realisasi masih **fluktuatif**, dengan kenaikan pada Februari dan penurunan pada Maret, sehingga konsistensi perlu diperkuat.
- Pelabuhan dengan kinerja terbaik antara lain PPS Nizam Zachman Jakarta sebagai kontributor terbesar dengan realisasi tinggi dan stabil, PPS Kendari dengan tren peningkatan yang konsisten, serta PPN Kejawanen dengan kontribusi yang signifikan dan relatif stabil.

Indikator Kinerja (IK) 7 – Persentase pelabuhan perikanan dengan tingkat kinerja baik

Indikator ini menunjukkan menunjukkan jumlah pelabuhan perikanan dengan Tingkat kinerja minimal baik berdasarkan aplikasi PIPP. Penilaian evaluasi kinerja operasional pelabuhan perikanan berdasarkan laporan kegiatan pelabuhan perikanan yang diinput dan disampaikan melalui sistem informasi Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27

Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan.

Metode evaluasi kinerja operasional pelabuhan perikanan menggunakan metode pembobotan (scoring method) yang mengacu pada berbagai parameter yang dikelompokkan dalam beberapa indikator meliputi: administrasi dan system informasi, Fasilitas Pelabuhan, pelayanan public, investasi industri.

Parameter tersebut dijadikan tolak ukur dalam melakukan evaluasi kinerja operasional Pelabuhan Perikanan dengan kurun waktu pelaksanaan secara bulanan sesuai dengan tolak ukurnya. Parameter penilaian evaluasi kinerja operasional pelabuhan perikanan dibedakan berdasarkan kelas pelabuhan perikanan yaitu Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS), Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN), Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) dan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI).

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Pelabuhan perikanan bulan Februari 2026 yang dilakukan terhadap 281 pelabuhan perikanan terdiri dari :

1. UPT Ditjen Perikanan Tangkap= 31, UPT Daerah= 244, Pelabuhan Perikanan yang tidak dibangun Pemerintah dan Pemerintah Daerah= 3
2. PPS= 7, PPN= 20, PPP= 40, PPI= 50, dan Pelabuhan Perikanan= 161
3. Data menunjukkan bahwa sebagian besar pelabuhan perikanan berada pada kategori “KURANG” hingga “SEDANG”, dengan proporsi pelabuhan berkinerja “BAIK” dan “SANGAT BAIK” relatif lebih sedikit. Hal ini mengindikasikan bahwa secara nasional, kinerja pelabuhan perikanan masih belum optimal dan memerlukan intervensi kebijakan lebih lanjut, khususnya pada pelabuhan - pelabuhan dengan nilai rendah hingga nol. Rentang nilai kinerja sangat lebar, mulai dari 0,00 hingga 96,50, mencerminkan adanya ketimpangan kapasitas, sarana prasarana, dan kualitas tata kelola antar pelabuhan

4. Hasil Penilaian:

a. Kategori Sangat Baik

Pelabuhan dengan nilai di atas ± 85 menunjukkan kinerja SANGAT BAIK, berjumlah 47 pelabuhan.

Ciri umum pelabuhan berkinerja sangat baik:

- Umumnya merupakan UPT Pusat atau pelabuhan dengan dukungan kelembagaan kuat.
- Memiliki fungsi layanan yang berjalan relatif lengkap (operasional kapal, pencatatan produksi, fasilitas darat).
- Potensi perikanan dan aktivitas pendaratan ikan yang aktif. Pelabuhan dalam kategori ini dapat dijadikan role model atau rujukan praktik baik (*best practices*) bagi pelabuhan lainnya.

b. Kategori Baik

Pelabuhan dengan nilai $\pm 70 - 84$ menunjukkan kinerja BAIK, berjumlah 42 pelabuhan.

Ciri umum pelabuhan berkinerja baik :

- Sudah memenuhi sebagian besar indikator kinerja.
- Masih memiliki ruang perbaikan pada aspek konsistensi pelayanan, pemanfaatan fasilitas, atau kualitas data.

c. Kategori Sedang

Pelabuhan dengan nilai $\pm 50 - 69$ menunjukkan kinerja SEDANG, berjumlah 55 pelabuhan.

Ciri umum pelabuhan berkinerja Sedang:

- Fungsi pelabuhan berjalan, namun belum optimal.
- Terdapat kelemahan struktural, seperti keterbatasan SDM, pemeliharaan fasilitas, atau sistem pelaporan data.
- Membutuhkan intervensi pembinaan teknis dan manajerial agar dapat naik ke kategori baik.

d. Kategori Kurang

Pelabuhan dengan nilai < 50 menunjukkan kinerja KURANG, berjumlah 47 pelabuhan.

Ciri utama kategori ini:

- Indikator kinerja tidak terpenuhi atau tidak dilaporkan.
- Aktivitas pelabuhan sangat rendah atau tidak berjalan.
- Berpotensi disebabkan oleh:
 - Ø Minimnya aktivitas perikanan tangkap
 - Ø Keterbatasan sarana-prasarana
 - Ø Permasalahan kelembagaan dan kewenangan
 - Ø Tidak tersedianya data dukung yang memadai

5. Kesimpulan

- a. Berdasarkan hasil penilaian terjadi penurunan hasil penilaian pada bulan Januari dibandingkan bulan Desember, yaitu :

No.	Hasil Penilaian	Jumlah Pelabuhan	
		Januari 2026	Februari 2026
a.	Sangat Baik	55	47
b.	Baik	36	42
c.	Sedang	53	55
d.	Kurang	137	47

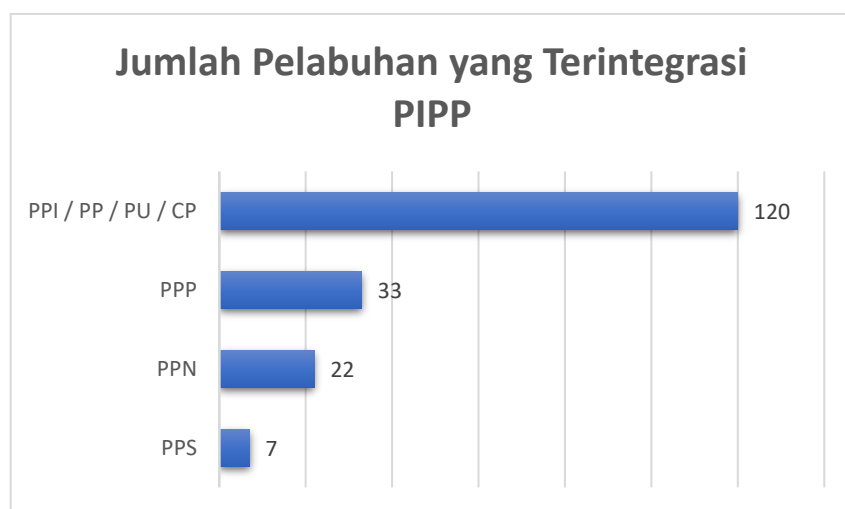
- b. Secara umum, hasil evaluasi kinerja pelabuhan perikanan menunjukkan bahwa:
- Sasaran peningkatan persentase pelabuhan berkinerja baik belum tercapai optimal.
 - Diperlukan intervensi selektif dan berbasis klaster kinerja, yaitu:
 - Ø Penguatan dan replikasi praktik baik pada pelabuhan sangat baik dan baik.
 - Ø Pendampingan teknis intensif untuk pelabuhan kategori sedang.
 - Ø Evaluasi mendalam dan kebijakan khusus bagi pelabuhan dengan kinerja kurang dan nol.
- c. Isu Strategis yang Teridentifikasi
- Ketimpangan kinerja antar pelabuhan masih sangat tinggi.
 - Banyak pelabuhan belum mampu memenuhi indikator dasar evaluasi kinerja.
 - Pelaporan dan ketersediaan data masih menjadi kendala utama pada pelabuhan bernilai rendah.
 - Perlu penguatan peran pembinaan dan monitoring oleh Direktorat Kepelabuhanan Perikanan.

Indikator Kinerja (IK) 8 – Persentase pelabuhan perikanan yang terintegrasi dengan Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP)

Indikator ini menunjukkan jumlah Pelabuhan perikanan UPT Pusat dan Daerah yang melayani kapal perikanan laut dan tercantum dalam Rencana Induk Pelabuhan Perikanan, selain yang berstatus Calon Pelabuhan (CP), yang tergabung dengan aplikasi PIPP. Target indikator kinerja ini sebesar 41%. Cara menghitungnya adalah pelabuhan perikanan yang terintegrasi PIPP dibagi dengan jumlah pelabuhan perikanan dalam RIPPN No. 132/2023 sebanyak 455 lokasi.

IK Persentase Pelabuhan Perikanan yang Terintegrasi dengan Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP) pada Triwulan I Tahun 2026 belum dilakukan penghitungan, karena IK Persentase Pelabuhan Perikanan yang Terintegrasi dengan Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP) belum dapat dilakukan penghitungan secara keseluruhan karena Indikator Kinerja ini ditargetkan tahunan.

Sampai dengan bulan Maret tahun 2026, sebanyak 182 pelabuhan perikanan telah terintegrasi dengan aplikasi PIPP dengan rincian sebagai berikut:



Jika dibandingkan dengan tahun 2025, terdapat penambahan pelabuhan perikanan yang terintegrasi dengan aplikasi PIPP sebanyak 16 (enam belas) pelabuhan perikanan, sebagai berikut:

No	Nama Pelabuhan	No	Nama Pelabuhan
	PP. Banyusangkah	9	PP. Moro
	PP. Wameo	10	PP. Numana
	PP. Masami	11	PPI. Sungai Selan
	PP. Ujung Blang	12	PPI. Manggar
	PP. Mato	13	CP. Lontar
	PPI. Carocok Tarusan	14	PPI. Palipi
	PP. Sadai	15	PPI. Muara Piluk Bakauheni
	PP. Bonto Bahari Bulukumba	16	PP. Masohi

Dalam rangka memperbaiki kinerja dan capaian pelabuhan perikanan yang terintegrasi dengan PIPP, Direktorat Kepelabuhanan Perikanan pada bulan Februari tahun 2026 telah mengadakan kegiatan Optimalisasi dan Pemutakhiran Sistem Aplikasi PIPP menuju Implementasi yang Efektif. Kegiatan ini bertujuan untuk memperbaiki kendala teknis yang ditemukan dalam operasional aplikasi, menyempurnakan tampilan UI/UX serta alur penggunaan agar lebih sederhana dan efisien, serta memperbarui panduan penggunaan sistem sesuai dengan pembaruan yang dilakukan. Melalui kegiatan ini diharapkan terjadi peningkatan pemahaman dan penyamaan persepsi petugas dalam penggunaan sistem versi terbaru, meningkatnya konsistensi pelaksanaan pendataan dan pelaporan, serta meningkatnya kualitas dan validitas data yang dihasilkan sebagai dasar monitoring, evaluasi kinerja operasional pelabuhan perikanan, dan dukungan terhadap kebutuhan data dalam pelaksanaan kebijakan sektor kelautan dan perikanan.

Hasil dari kegiatan ini adalah perbaikan oleh Tim IT sebagai berikut:

1. Validasi data dan integrasi API
2. Perbaikan form, tipe isian, dan aturan isian
3. Hak Akses, privilege, dan pengelolaan peran
4. Penyempurnaan fitur *Search* dan mekanisme pencarian
5. Restrukturisasi menu dan konsistensi terminologi
6. Penambahan menu arsip dan tata kelola status
7. Penghapusan/penyembunyian menu
8. Perbaikan data master, field dan structure modul fasilitas
9. Penyesuaian aturan tarik data dan logika sistem, dan
10. Pengembangan lanjutan

Tindak Lanjut kegiatan ini akan dilaksanakan kembali kegiatan Training Of Trainer (ToT) Aplikasi Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP) Tahap 2 dengan menyampaikan Aplikasi PIPP yang telah diperbaharui sesuai dengan masukan dan permasalahan yang ditemukan pada kegiatan yang pertama.



Indikator Kinerja (IK) 9 – Tingkat kinerja kesyahbandaran di pelabuhan perikanan

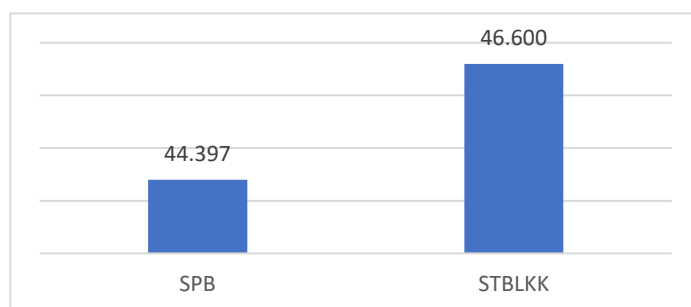
Indikator kinerja tingkat kinerja kesyahbandaran pelabuhan perikanan dihitung berdasarkan dua komponen, yaitu peningkatan kapasitas SDM Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan dengan bobot penilaian 40%, dan peningkatan jumlah pelabuhan perikanan yang menerapkan kesyahbandaran dengan bobot penilaian 60%.

Indikator kinerja tingkat kinerja kesyahbandaran di pelabuhan perikanan pada Triwulan I Tahun 2026 belum dilakukan penghitungan, karena Indikator Kinerja ini ditargetkan tahunan. Beberapa kegiatan yang mendukung capaian indikator kinerja ini yaitu sebagai berikut:

1. Mengumpulkan dan menganalisis perkembangan penerbitan PB dan STBLKK. Berdasarkan hasil analisis diperoleh informasi jumlah penerbitan SBP dan STBLKK disetiap bulannya.
2. Melakukan pemetaan kebutuhan penempatan dan penugasan Syahbandar di Pelabuhan Perikanan guna formasi CPNS tahun 2026.
3. Melakukan updating akun user TemanSPB pada beberapa Pelabuhan Perikanan baik UPT Pusat maupun UPT Daerah seiring dengan selesainya pelaksanaan Pelatihan Dasar Kesyahbandaran bagi Petugas Kesyahbandaran
4. Harmonisasi rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan yang diinisiasi oleh Kementerian Hukum yang merupakan bagian dari tindak lanjut Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor B.1456/SJ/HK.160/XII/2025 tanggal 29 Desember 2025 perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan
5. Dalam rangka meningkatkan pelayanan Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan dan optimalisasi penempatan dan penugasan Syahbandar di Pelabuhan Perikanan, dilaksanakan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor: 22 Tahun 2025 tentang Penugasan dan Penempatan Syahbandar di Pelabuhan Perikanan diketahui bahwa jumlah Syahbandar di Pelabuhan Perikanan yang ditugaskan adalah sebanyak 197 orang yang tersebar di 274 pelabuhan
 - b. Terhadap penempatan dan penugasan Syahbandar tersebut, telah dilakukan pemantauan dan evaluasi melalui aplikasi TemanSPB. Adapun hasil pemantauan dan evaluasi tersebut diketahui bahwa:
 - sebanyak **190 pelabuhan** telah menggunakan aplikasi TemanSPB dalam memberikan pelayanan kesyahbandaran di Pelabuhan Pangkalan; dan
 - terdapat **84 pelabuhan** (terlampir) belum menerapkan pelayanan Kesyahbandaran melalui aplikasi TemanSPB;
 - c. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, guna optimalisasi penempatan dan penugasan Syahbandar di Pelabuhan Perikanan, perlu untuk dilakukan monitoring atau pembinaan serta diseminasi ke lokasi pelabuhan perikanan yang belum menerapkan pelayanan Kesyahbandaran melalui aplikasi TemanSPB tersebut serta untuk mengetahui aktifitas kesyahbandaran yang ada di lokasi pelabuhan tersebut.

- d. Guna memberikan kemudahan dan kecepatan dalam pelayanan kesyahbandaran telah disediakan Sistem Informasi TemanSPB dan telah diterapkan di 191 Pelabuhan telah menerapkan aplikasi TemanSPB dengan jumlah Persetujuan Berlayar yang diterbitkan periode Triwulan I Tahun 2026 tercatat sebanyak 44.397 dokumen dan jumlah STBLKK yang diterbitkan sebanyak 46.600 dokumen

Rekapitulasi Penerbitan Persetujuan Berlayar dan STBLKK Januari-Maret 2026



Indikator Kinerja (IK) 10 – Tingkat pelayanan kapal perikanan yang dilayani melalui mekanisme *Port State Measures Agreement (PSMA)*

Indikator kinerja Tingkat pelayanan kapal perikanan yang dilayani melalui mekanisme *Port State Measures Agreement (PSMA)* adalah Tingkat kinerja pelayanan kapal berbendera asing yang dilayani melalui mekanisme PSMA dan dihitung berdasarkan dua komponen, yaitu:

- Jumlah SDM yang memahami penerapan PSMA, dengan bobot penilaian 30%.
- Survey kepuasan pengguna jasa terhadap pelayanan AREP, dengan bobot penilaian 70%.

Indikator kinerja Tingkat pelayanan kapal perikanan yang dilayani melalui mekanisme *Port State Measures Agreement (PSMA)* pada Triwulan I Tahun 2026 belum dilakukan penghitungan, karena Indikator Kinerja ini ditargetkan tahunan.

Pada periode Triwulan I Tahun 2026, telah dilakukan beberapa kegiatan dalam mendukung Indikator Kinerja ini sebagai berikut:

- Telah terbit 94 Notifikasi Penerimaan Kapal Asing Masuk ke Pelabuhan kepada 47 Kapal Perikanan Berbendera Jepang, 1 Kapal Perikanan Berbendera Korea Selatan. Tujuan kapal – kapal berbendera Jepang dan Korea tersebut masuk ke Pelabuhan yang telah ditetapkan adalah pergantian crew, pengisian perbekalan dan BBM. Hasil pemeriksaan PSM ke-94 kapal perikanan berbendera asing tersebut telah dilaporkan dan disampaikan kepada PSMA Sekretariat - *Food and Agriculture Organization (FAO)*, negara bendera dan organisasi perikanan regional terkait.
- Pembahasan rencana transloading ikan hasil tangkapan dari kapal perikanan berbendera asing ke truk kontainer yang selanjutnya diangkut menuju Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dan selanjutnya diangkut kembali ke negara kapal penangkap ikan.
- Beberapa upaya yang akan dilakukan guna peningkatan penerapan PSMA pada Tahun 2026, diantaranya:
 - Pelatihan bagi Petugas Pemeriksa Kapal Asing/PSM Inspector;

- Workshop/Diseminasi Penerapan PSMA pada lokasi Pelabuhan Tempat Pelaksanaan PSM yang baru dengan melibatkan instansi terkait; dan
- Koordinasi dan Penyusunan SOP bersama terkait dengan pelaksanaan PSM pada Pelabuhan Tempat Pelaksanaan PSM yang baru.

Indikator Kinerja (IK) 11 – Tingkat Kinerja Penerapan Pelaksanaan Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI)

Indikator Tingkat kinerja Penerapan Pelaksanaan Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) dihitung berdasarkan:

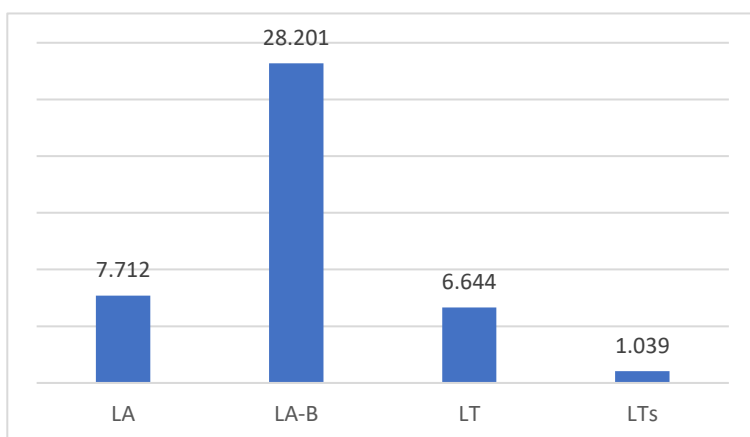
- Peningkatan kapasitas SDM petugas SHTI yang ditetapkan, dengan bobot penilaian 30%.
- Peningkatan jumlah SDM Operator LA, dengan bobot penilaian 50%.
- Jumlah verifikasi SHTI dari negara importir, dengan bobot penilaian 20%.

Indikator Tingkat kinerja Penerapan Pelaksanaan Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) pada Triwulan I Tahun 2026 belum dilakukan penghitungan, karena Indikator Kinerja ini ditargetkan tahunan.

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, pelaksanaan SHTI telah melaksanakan beberapa hal berikut:

- Penerapan SHTI sepenuhnya telah dilakukan melalui aplikasi Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan di 32 Otoritas Kompeten Lokal (OKL) dan 86 pelabuhan perikanan non OKL penerbit Lembar Awal.
- Perkembangan penerbitan SHTI pada periode Januari sampai dengan Desember 2025 telah terbit SHTI Lembar Turunan 31.744 dokumen, SHTI Lembar Turunan Yang Disederhanakan 4.748 dokumen, dan Pernyataan Pengolahan sebanyak 549 dokumen. Jumlah penerbitan Lembar Awal form A sebanyak 32.214 dokumen dan Lembar Awal Form B sebanyak 83.364 dokumen.

Rekapitulasi Penerbitan SHTI Bulan Januari-Maret Tahun 2026



Indikator Kinerja (IK) 12 – Tingkat Penerapan Penangkapan Ikan Terukur dan PNBP Pasca Produksi di Pelabuhan Pangkalan yang Ditetapkan.

Indikator kinerja ini mencakup pelabuhan perikanan yang memenuhi kriteria yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan PNBP Pasca Produksi. Kriteria yang dimaksud terdiri dari tiga bagian, yaitu:

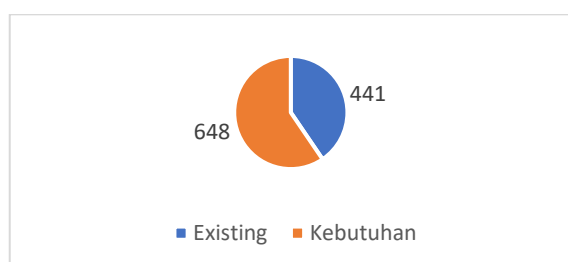
- Persentase ketersediaan SDM pendukung penerapan PNBP Pasca Produksi (Ketersediaan SDM dibanding dengan kebutuhan SDM berdasarkan ABK)
- Persentase jumlah kapal perikanan izin pusat yang berkontribusi terhadap PNBP Pasca Produksi (Jumlah kapal yang berkontribusi/kapal ijin pusat (ijin pasca)
- Persentase pendataan produksi ikan hasil tangkapan dari pendaratan kapal ijin pusat (Perbandingan pelabuhan perikanan yang menyampaikan data dengan kepatuhan input di PIPP)

Permen KP No. 28/2023 Pasal 1 angka 15, Pelabuhan Pangkalan adalah pelabuhan perikanan atau pelabuhan umum sebagai tempat Kapal Perikanan bersandar, berlabuh, bongkar muat ikan, dan/atau mengisi perbekalan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan. Pelabuhan pangkalan tersebut tidak hanya Pelabuhan Perikanan yang dibangun dan/ atau dioperasikan oleh pemerintah pusat dan Pelabuhan Perikanan yang dibangun dan/atau dioperasikan oleh pemerintah daerah, namun juga termasuk Pelabuhan Perikanan yang tidak dibangun dan/atau dioperasikan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah, serta Pelabuhan Umum.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang Berasal dari Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan, pada Pasal 1 Enumerator Kelautan dan Perikanan adalah petugas non-aparatur sipil negara yang melakukan kegiatan pengumpulan, pencatatan, verifikasi, pengolahan, analisis, dan pendokumentasian data di bidang kelautan dan perikanan.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan sumberdaya enumerator kelautan dan perikanan, Direktorat Kepelabuhanan perikanan telah melakukan perekrutan enumerator kelautan dan perikanan melalui jasa lainnya perorangan sejumlah 441 orang yang tersebar di 126 Pelabuhan pangkalan dengan menggunakan anggaran yang tersedia.

Per 31 Maret tahun 2026, jumlah SDM yang tersedia yaitu 441 dari kebutuhan 648.



Selain itu, per 31 Maret tahun 2026 terdapat 136 pelabuhan pangkalan dengan jumlah PNBP lunas sebesar Rp.223.001.958.305 (dua ratus dua puluh tiga miliar satu juta Sembilan ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus lima rupiah).

Indikator Kinerja (IK) 13 – Pelabuhan pangkalan yang menerapkan PNBP Pascaproduksi

Melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 187 tahun 2023 tentang Pelabuhan Pangkalan pada Zona Penangkapan Ikan Terukur dan Pelabuhan Pangkalan yang telah memenuhi syarat penarikan pasca produksi telah ditetapkan 296 pelabuhan pangkalan.

Pelabuhan Perikanan untuk dapat ditetapkan menjadi Pelabuhan Pangkalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf a dan huruf b harus memenuhi persyaratan telah memiliki fasilitas paling sedikit meliputi:

- a. fasilitas pokok terdiri atas tanah, dermaga, kolam pelabuhan, dan jalan;
- b. fasilitas fungsional terdiri atas kantor administrasi pelabuhan, tempat pemasaran ikan, air bersih, dan listrik; dan
- c. fasilitas penunjang, yaitu mandi cuci kakus.

Merujuk pada ketentuan Pasal 25 sampai dengan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023, pelabuhan pangkalan dipersyaratkan untuk memenuhi tiga kelompok kriteria yang saling terkait, yakni kriteria administratif, teknis, dan operasional. Ketiganya bukan kategori yang berdiri sendiri; kegagalan dalam satu aspek sangat mungkin merembet ke aspek lain (sebab, misalnya, kelengkapan administratif tanpa dukungan teknis yang memadai dapat membuat operasional berjalan “seadanya,” sementara kesiapan teknis tanpa kepastian administratif dapat menghambat penegakan kewajiban dan penataan layanan). Dengan kerangka tersebut, kriteria yang ditetapkan regulasi mencakup:

1. Kriteria administratif, yang mencakup:
 - adanya dasar hukum yang sah untuk penetapan sebagai pelabuhan perikanan atau pelabuhan pangkalan;
 - kejelasan status lahan dan aset serta keterkaitannya dengan kewenangan pengelola;
 - ketersediaan dokumen tata ruang dan izin lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Kriteria teknis, yang mencakup:
 - tersedianya fasilitas pokok, fungsional, dan penunjang yang memadai bagi kegiatan perikanan tangkap, seperti dermaga, kolam pelabuhan, tempat pendaratan ikan (TPI), kantor syahbandar, fasilitas timbangan, cold storage, serta sistem pencatatan hasil tangkapan ikan;
 - kondisi fasilitas yang layak operasi dan memenuhi standar pelayanan pelabuhan perikanan.
3. Kriteria operasional, yang mencakup:
 - pemanfaatan pelabuhan sebagai tempat pendaratan kapal ikan berizin pusat atau daerah, sesuai WPPNRI sebagaimana tercantum dalam izin penangkapan;
 - kecukupan sumber daya manusia (misalnya syahbandar, enumerator, validator, petugas PNBP, dan pengelola pelabuhan)
 - penerapan mekanisme penarikan PNBP pascaproduksi serta sistem pelaporan data elektronik melalui Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP).

Kegiatan evaluasi dilakukan oleh Direktorat Kepelabuhanan Perikanan bersama unit pelaksana teknis di daerah melalui koordinasi dan verifikasi langsung di lapangan. Evaluasi mencakup:

- Aspek administratif: legalitas, status lahan, dokumen perizinan, dan SK penetapan.
- Aspek teknis: ketersediaan fasilitas pokok (dermaga, kolam, TPI), fungsional (kantor, listrik, air bersih), dan penunjang (cold storage, MCK, akses jalan).

- Aspek operasional: kesiapan SDM (Syahbandar, Enumerator, PJ PNBP) dan aktivitas kapal berizin pusat.

Dari hasil evaluasi terhadap 296 pelabuhan, sebanyak 179 pelabuhan dinyatakan memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai Pelabuhan Pangkalan PIT dan PNBP Pascaproduksi.

Progres Capaian

1. Aspek Administratif

- Dari total 296 pelabuhan, sebanyak 156 pelabuhan (53%) telah memenuhi kriteria administratif sesuai Permen KP 28/2023.
- 68 pelabuhan (23%) telah menarik PNBP pascaproduksi tetapi masih belum memenuhi kelengkapan administratif (SK penetapan, status lahan, dan dokumen tata ruang).
- Ditemukan potensi tumpang tindih kewenangan antara izin pusat dan daerah, memerlukan sinkronisasi data perizinan kapal.

2. Aspek Teknis

- 63 pelabuhan (21%) memiliki fasilitas lengkap (tanah, dermaga, kolam, jalan, kantor, TPI, listrik, air bersih, MCK, cold storage).
- 25 pelabuhan (8%) memiliki fasilitas lengkap namun belum terdapat aktivitas PNBP.
- 23 pelabuhan (7%) menunjukkan potensi tinggi akibat migrasi kapal berizin pusat.
- Ditemukan disparitas besar antar wilayah: pelabuhan di wilayah timur umumnya lebih lengkap secara fisik, sedangkan pelabuhan di wilayah barat lebih kuat dalam administrasi dan pendataan.

3. Aspek Operasional

- Sebagian besar pelabuhan telah aktif melayani kapal izin pusat dan daerah, namun SDM enumerator dan syahbandar masih terbatas.
- Pengawasan aktivitas pendaratan dan pelaporan hasil tangkapan belum seragam, terutama pada pelabuhan non-UPT pusat.

Aspek Penilaian	Jumlah Pelabuhan	Persentase	Keterangan
Administratif Lengkap	156	53%	Telah memenuhi syarat dokumen & izin
Teknis Lengkap	131	44%	Fasilitas utama tersedia dan berfungsi
Operasional Aktif	179	60%	Layak ditetapkan sebagai pelabuhan pangkalan
Dalam Pembinaan	89	30%	Perlu perbaikan administrasi dan fasilitas
Tidak Layak (sementara)	28	9%	Fasilitas belum memenuhi standar minimum

4. Analisis Kelayakan Penetapan

ASPEK	KRITERIA EVALUASI	KETERANGAN
ADMINISTRATIF	Penetapan resmi, rencana induk, izin operasional	156 pelabuhan layak
TEKNIS FASILITAS	Fasilitas pokok, fungsional, penunjang	131 pelabuhan memenuhi sebagian
OPERASIONAL & SDM	Ada syahbandar, PJ PNBP, enumerator aktif	Perlu optimalisasi di 68 pelabuhan
POTENSI EKONOMI & MIGRASI KAPAL	Aktivitas tangkap tinggi, kontribusi PNBP signifikan	23 pelabuhan prioritas strategis
AKSESIBILITAS & DUKUNGAN DAERAH	Dukungan pemda dan stakeholder	85% pelabuhan siap dukung PIT

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap beberapa aspek kunci, dapat disusun kesimpulan sebagai berikut:

1. Aspek Administratif (Baseline Kelayakan). Sebanyak 156 pelabuhan telah memenuhi kriteria administratif (penetapan resmi, rencana induk, dan izin operasional). Hal ini menunjukkan bahwa secara legal-formal, 100% pelabuhan dalam sampel telah memiliki dasar hukum, sehingga tidak terdapat hambatan signifikan pada tahap legitimasi operasional.
2. Aspek Teknis Fasilitas (Kesiapan Infrastruktur). Sebanyak 131 pelabuhan ($\pm 84\%$) telah memenuhi sebagian kriteria fasilitas (pokok, fungsional, dan penunjang). Artinya, masih terdapat sekitar 25 pelabuhan ($\pm 16\%$) yang belum memenuhi standar minimal, sehingga berpotensi menghambat efektivitas operasional pelabuhan pangkalan.
3. Aspek Operasional & SDM (Efektivitas Pelaksanaan). Sebanyak 68 pelabuhan ($\pm 44\%$) masih memerlukan optimalisasi terkait keberadaan dan kinerja syahbandar, PJ PNBP, serta enumerator. Hal ini menunjukkan bahwa hampir setengah dari total pelabuhan belum memiliki dukungan SDM yang optimal, yang berdampak langsung pada kualitas layanan dan akurasi penarikan PNBP.
4. Aspek Potensi Ekonomi & Migrasi Kapal (Prioritas Strategis). Ditemukan 23 pelabuhan ($\pm 15\%$) yang memiliki aktivitas penangkapan tinggi dan kontribusi PNBP signifikan. Kelompok ini dapat dikategorikan sebagai pelabuhan prioritas strategis, yang memiliki leverage tinggi terhadap peningkatan penerimaan negara dan keberhasilan implementasi PIT.
5. Aspek Aksesibilitas & Dukungan Daerah (Kesiapan Implementasi PIT). Sebesar 85% pelabuhan telah mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah dan stakeholder, menunjukkan tingkat kesiapan yang relatif tinggi dalam mendukung implementasi kebijakan PIT secara regional.

Indikator Kinerja (IK) 14 – Persentase pelaksanaan Pembangunan/pengembangan pelabuhan perikanan yang terintegrasi dengan *Fish Market* bertaraf internasional

Indikator ini menunjukkan Persentase pelaksanaan pembangunan pelabuhan perikanan yang terbangun melalui pembiayaan PHLN dan telah dilakukan perjanjian pendanaan (*Loan Agreement*). Penyiapan pelabuhan perikanan ini dalam rangka pengembangan dan peningkatan fasilitas pelabuhan perikanan yang terintegrasi dan Pasar Ikan bertaraf Internasional.

Proyek pembangunan dan pengembangan pelabuhan perikanan yang terintegrasi dengan *Fish Market* bertaraf internasional dilaksanakan di PPN Pengambengan dan PPN Kejawanan dengan dukungan pendanaan dari *Islamic Development Bank* (IsDB). Proyek ini bertujuan untuk mendukung program Penangkapan Ikan Terukur (PIT) sesuai standar internasional serta meningkatkan kualitas layanan bagi nelayan, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.

Tujuan Proyek

Proyek Integrated Fishing Ports and International Fish Markets (IFP–IFM) Phase-I yang didanai oleh Islamic Development Bank (IsDB) bertujuan memodernisasi pelabuhan perikanan melalui pembangunan infrastruktur, pengadaan peralatan, peningkatan tata kelola, dan penguatan kapasitas kelembagaan. Lokasi proyek berada di:

- PPN Pengambengan
- PPN Kejawanan

Kondisi Pelaksanaan Triwulan I 2026

Pada periode Januari–Maret 2026, proyek masih berada pada **fase persiapan implementasi** dan belum memasuki pekerjaan konstruksi fisik. Fokus utama diarahkan pada:

- Penyempurnaan dokumen pengadaan konstruksi.
- Persiapan pengadaan konsultan operasional pelabuhan (PMOC).
- Persiapan pengadaan peralatan (equipment).
- Monitoring kontrak konsultan PMC dan CMC.
- Penguatan kapasitas SDM dan kelembagaan.
- Pengendalian pembiayaan proyek.

Capaian Utama Triwulan I 2026

1. Persiapan Pengadaan Civil Works

Telah dilakukan:

- Review dan penyempurnaan DED.
- Penyempurnaan Engineer's Estimate (EE).
- Penyempurnaan Bill of Quantities (BoQ).
- Penyempurnaan Employer's Requirements dan Request for Bids (RfB).
- Koordinasi intensif dengan IsDB, PMC, CMC, PIU, dan Pokja.

Hasil: Dokumen pengadaan konstruksi semakin matang dan siap menuju proses tender.

2. Persiapan PMOC

Dokumen utama telah disusun:

- Terms of Reference (TOR)
- Request for Proposal (RFP)
- Cost Estimate
- Draft Contract

Hasil: Dokumen PMOC siap untuk memasuki proses pengadaan.

3. Persiapan Pengadaan Equipment

Kegiatan meliputi:

- Identifikasi kebutuhan peralatan.
- Penyusunan spesifikasi teknis.
- Penyusunan EE.
- Penyusunan dan review dokumen pengadaan.

Hasil: Seluruh dokumen dasar telah tersedia sebagai landasan pengadaan pada triwulan berikutnya.

4. Monitoring Konsultan

- PMC dinilai memberikan dukungan memadai dalam manajemen proyek dan pengadaan.

- CMC aktif melakukan review dokumen teknis dan mendukung penyempurnaan dokumen tender.

Hasil: Deliverables kedua konsultan berjalan sesuai target.

5. Institutional Strengthening

Kegiatan yang dilaksanakan:

- Capacity building.
- Workshop dan pelatihan pengadaan IsDB.
- Pelatihan pengelolaan proyek dan keuangan.
- Green Port Short Course.

Hasil: Kompetensi SDM pelaksana proyek meningkat.

Kinerja Pembiayaan

Uraian	Nilai
Total Loan	EUR 100.000.000
Disbursement	EUR 2.269.109
Persentase Disbursement	2,27%
Direct Payment	EUR 861.554
Special Account	EUR 1.407.556
Expenditure	EUR 2.036.065
Persentase Expenditure	2,04%

Catatan:

- Backlog telah ditindaklanjuti.
- Rekonsiliasi Special Account dilakukan berkala.
- Outstanding expenditure masih dalam proses monitoring.

Permasalahan dan Tantangan

Pengadaan

- Penyempurnaan dokumen masih berlangsung.
- Banyak revisi berdasarkan hasil review IsDB.
- Proses koordinasi lintas pihak cukup kompleks.

Pembiayaan

- Penyerapan anggaran masih rendah karena konstruksi belum dimulai.

Kelembagaan

- Perlu peningkatan kapasitas SDM dalam pengadaan internasional, manajemen kontrak, dan pengelolaan pembiayaan luar negeri.

Kesimpulan

Secara umum, pelaksanaan Proyek IFP–IFM Phase-I pada Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan progres positif. Walaupun konstruksi fisik belum dimulai, hampir seluruh dokumen utama pengadaan telah disempurnakan, tata kelola proyek dan pembiayaan berjalan baik, kapasitas SDM meningkat, serta koordinasi dengan IsDB dan para konsultan semakin kuat. Kondisi ini menjadi fondasi yang memadai untuk memasuki tahap tender dan pelaksanaan konstruksi pada Triwulan II Tahun 2026.

Indikator Kinerja (IK) 15 – Persentase pelaksanaan Pembangunan/pengembangan pelabuhan perikanan yang menerapkan *Eco Fishing Port*

Indikator ini menunjukkan persentase pelaksanaan pembangunan pelabuhan perikanan yang terbangun melalui pembiayaan PHLN dan telah dilakukan perjanjian pendanaan (*Loan Agreement*). Penyiapan pelabuhan perikanan ini dalam rangka pengembangan dan peningkatan fasilitas pelabuhan perikanan yang berwawasan lingkungan.

Indikator Kinerja Persentase pelaksanaan Pembangunan/pengembangan pelabuhan perikanan yang menerapkan *Eco Fishing Port* pada Triwulan I Tahun 2026 belum dilakukan penghitungan, karena Indikator Kinerja ini ditargetkan tahunan.

Outer Ring Fishing Ports Development (Eco Fishing Port)

Jumlah Pinjaman	: Pinjaman EUR 98,67 Juta (setara dengan USD 105 Juta atau Rp1,66 Triliun)
Nama Lender	: Agence Française de Développement (AFD)
Lokasi	: PPS Cilacap, PPS Bitung, PPS Kendari, PPS Belawan
Pelaksanaan	: Periode Pinjaman 2023-2027
Durasi	: 60 Bulan
Periode Konstruksi	: 3 tahun (setelah kontrak)
Status Loan Agreement	: Sudah - 23 Desember 2022

Loan Agreement/Credit Facility Agreement (CFA) CID 1109 01)

Status Loan Effective : Sudah - 28 Juni 2023

Loan Effective Proyek Eco Fishing Port (Surat Kementerian Keuangan no S204/PR/PR.2/2023 tanggal 5 Juli 2023).

Secara umum, proyek terdiri atas Komponen 1 berupa pengembangan infrastruktur pelabuhan perikanan senilai 86 Juta EUR (Rp 1,45 T), Komponen 2 berupa penguatan sistem, sertifikasi, dan keberlanjutan pengelolaan sumber daya ikan senilai 7 Juta EUR (Rp 119,05 M) (porsi loan) dan 2,95 Juta EUR (Rp 49,8 M) (porsi grant), serta Komponen 3 berupa penguatan kapasitas kelembagaan, pelatihan, dan manajemen proyek senilai 5,64 Juta EUR (Rp 95,38 M) (porsi loan) dan 0,15 Juta EUR (Rp 2,53 M) (porsi grant).

Rencana Pelaksanaan Tahun 2026:

1. Tender Design and Build (DB) untuk lokasi PPS Bitung, PPS Cilacap, PPS Kendari dan PPS Belawan (telah terbit NOL Dokumen PQ untuk lokasi Bitung). Estimasi mulai tender Juni 2026
2. Pengumuman paket seleksi jasa konsultansi CMC PPS Bitung pada Maret 2026, PPS Cilacap dan PPS Kendari pada April 2026 dan PPS Belawan pada Juni 2026
3. Addendum kontrak TAO untuk melengkapi dokumen perencanaan, ESIA, dan survei teknis terkait
4. Estimasi penyusunan Design (DED) mulai TW IV 2026 oleh kontraktor DB.

Lingkup Kegiatan:

a. Jasa Konsultansi dan Pengawasannya:

- Jasa Konsultasi *Technical Assistant to the Owner* (TAO)
- Jasa Konsultansi *Construction Management Consultant* (CMC)

b. Pengembangan Infrastruktur Pelabuhan Perikanan (termasuk kontingensi): PPS Cilacap, PPS Kendari, PPS Bitung dan PPS Belawan

c. Pengembangan Sistem, *Traceability*, *Capacity Building*, Manajemen Proyek, Hibah

Maksud dan Tujuan:

- Meningkatkan efisiensi, daya tarik, dan tata kelola pelabuhan
- Meningkatkan kualitas sanitasi, ketertelusuran dan nilai tambah produk perikanan
- Mengelola dampak dan tantangan lingkungan serta iklim

Progress

A. Persetujuan Inmen B.167 Tahun 2023

Telah terbit Risalah Persetujuan Pelaksanaan Proyek *Eco Fishing Port* pada 25 April 2025

B. Jasa Konsultasi

• Technical Assistance to the Owner (TAO):

(i) Kontrak TAO tanggal 11 Juni 2025. (ii) Addendum ke-1 tanggal 8 Desember 2026 penambahan ruang lingkup TAO.

Progress TAO: penyelesaian dokumen *basic design*, ESIA (seluruh lokasi). Penyelesaian dokumen PBJ untuk CMC dan DB. Terkait dengan pekerjaan pembuatan design and build, telah dilakukan rapat-rapat evaluasi dan koordinasi dengan PIU di 4 (empat) lokasi proyek Eco Fishing Port. Tantangan penyelesaian design and build adalah terdapat perubahan kebijakan terkait alokasi anggaran di masing-masing Lokasi proyek, sehingga perlu dilakukan penyesuaian sesuai dengan anggaran yang tersedia.

• Construction Management Consultant (CMC):

Menindaklanjuti rekomendasi hasil rapat Steering Committee tanggal 18 November 2025, proyek mengusulkan strategi pemaketan pengadaan baru untuk paket Construction Management Consultant (CMC) dan Design and Build (DB). Berdasarkan hal tersebut, PMU telah mengirimkan surat permohonan Review AFD dan No Objection Letter (NOL) untuk Paket Pengadaan Construction Management Consultant (CMC) dan Konstruksi Design and Build (DB) Proyek Eco Fishing Port pada tanggal 6 Januari 2026. AFD telah menanggapi permohonan tersebut dengan menerbitkan (i) NOL AFD untuk pemaketan CMC (6 Februari 2026 No. JAK/EH/2025/066) (ii) NOL AFD untuk dokumen tahapan REOI (23 Februari 2026 No. JAK/EH/2026/064).

Skema pemaketan pengadaan CMC tersebut adalah diusulkan menjadi 4 (empat) paket terpisah, masing-masing untuk lokasi Bitung, Belawan, Cilacap, dan Kendari. Metode pengadaan yang digunakan adalah National Competitive Bidding (NCB).

Progress Pengadaan CMC yang telah terlaksana adalah: (i) Telah dibentuk Pokja pemilihan CMC oleh Biro PBJ untuk seluruh lokasi. (ii) Telah diumumkan PBJ CMC PPS Bitung tanggal 11 Maret 2026 di SPSE 4.5.

Dokumen PBJ dan NOL sudah tersedia. Dokumen yang disiapkan adalah *Request for Expressions of Interest* (REOI)/Prequalification (PQ).

Dokumen REOI undangan penyampaian Pernyataan Minat (*Expressions of Interest*/EOI) untuk pengadaan Konsultan Manajemen Konstruksi (Construction Management Consultant/CMC) pada Proyek Pengembangan Pelabuhan Perikanan Lingkar Luar (Eco

Fishing Port) di PPS Bitung. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan PPS Bitung agar memenuhi standar internasional melalui:

- Meningkatkan efisiensi, daya tarik, dan tata kelola pelabuhan.
- Meningkatkan kualitas sanitasi, ketertelusuran (traceability), dan nilai tambah produk perikanan.
- Mengelola tantangan lingkungan hidup dan perubahan iklim.
- Ruang Lingkup Jasa Konsultan

Konsultan Manajemen Konstruksi (CMC) akan bertanggung jawab atas penyusunan dokumen teknis (engineering documents) serta pengawasan pekerjaan infrastruktur di PPS Bitung, yang meliputi:

- Memastikan pekerjaan konstruksi dilaksanakan sesuai dengan gambar kerja, spesifikasi teknis, ketentuan keselamatan kerja, dan jadwal pelaksanaan.
- Memberikan dukungan teknis dan pengawasan secara berkelanjutan selama pelaksanaan konstruksi.
- Mengevaluasi perubahan desain (design changes) dan pekerjaan tambah/kurang (variations).
- Memantau kemajuan pekerjaan infrastruktur untuk memastikan seluruh pekerjaan selesai dalam jangka waktu pembiayaan proyek.

Dokumen REOI telah mendapatkan NOL dari AFD pada tanggal 23 Februari 2025 dengan Nomor Surat JAK/EH/2026/064. Bersamaan disiapkannya pengumuman REOI juga telah disiapkan dokumen-dokumen untuk perubahan mekanisme pembayaran pekerjaan dan dokumen *Request for Proposal* (RFP).

Telah dilakukan rapat-rapat persiapan pengumuman REOI dan koordinasi teknis penerbitan pengumuman. Telah dilakukan pengumuman prakualifikasi/REOI pada tanggal 11 Maret s.d 2 April 2026.

Pada tanggal 9 Maret 2026 telah disampaikan permohonan review dan NOL Dokumen Request for Proposal (RFP) kepada AFD khususnya untuk seleksi jasa konsultansi CMC PPS Bitung.

• **Jasa Konstruksi *Design and Build* (DB)**

Pengajuan usulan pemaketan PBJ ke AFD (6 Januari 2026 No. B.48/DJPT.4/KI.310/I/2026) Rencana pengumuman PQ Pekerjaan konstruksi (Rancang Bangun) pada Juni 2026. Diusulkan menjadi 4 (empat) paket terpisah, masing-masing untuk satu lokasi. Metode pengadaan yang diusulkan adalah International Competitive Bidding (ICB) untuk lokasi Bitung, Belawan, dan Cilacap; dan National Competitive Bidding (NCB) untuk lokasi Kendari.

Progress PBJ DB: (i) Dilakukan pembahasan per lokasi bersama AFD. (ii) Telah terbit NOL AFD untuk dokumen PQ PPS Bitung dan dapat segera dilakukan tender pada Juni 2026. PMU telah menyampaikan Permohonan NOL Dokumen Pre-Qualification (PQ) disertai Update Timeline untuk Tender Pekerjaan Konstruksi Design and Build (DB) PPS Bitung pada Proyek Eco Fishing Port melalui surat Nomor B.1530/DJPT.4/TU.140/III/2026 tanggal 31 Maret 2026.

Pengumuman prakualifikasi tender konstruksi DB tersebut direncanakan tanggal 19 April 2026 dan perkiraan kontrak DB untuk PPS Bitung paling cepat dilaksanakan pada pertengahan Desember 2026. Perkiraan pelaksanaan pekerjaan konstruksi DB PPS Bitung akan dimulai pada awal Tahun 2027 dan selama 2,5 tahun (diawali dengan kegiatan penyusunan dokumen Detailed Engineering Design/DED) atau selesai pada Juni 2029 (*closing date* proyek pada Desember 2028).

C. Kegiatan Alignment EFP 2026

Kegiatan yang selaras dengan tujuan proyek Eco Fishing Port untuk Tahun Anggaran 2026 disusun dalam dokumen Annual Working Plan 2026. Penyusunan AWP dilakukan dengan mengacu kepada dokumen.

- Telah terbit NOL AFD untuk Annual Working Plan TA 2026 (19 Mei 2026 No. JAK/EH/2026/174)

Proses pengadaan konsultan ISO 14001 untuk sertifikasi Pelabuhan perikanan yang belum mendapatkan ISO 14001 dan resertifikasi Pelabuhan perikanan yang telah mendapatkan sertifikat namun telah habis berlaku

Isu/Kendala:

- Terdapat kebijakan internal sesuai Inmen KP 167 tahun 2023 (risalah persetujuan proyek oleh MKP)
- Kontrak TAO dilaksanakan pada 11 Juni 2025 (pasca risalah persetujuan) dan diperlukan penyesuaian lingkup kerja terhadap target keproyekan
- Review AFD untuk dokumen tender

Tindak Lanjut

- Konsultan TAO melakukan optimalisasi kinerja pencapaian target keproyekan (basic design, ESIA, dll)
- Melakukan seleksi jasa konsultansi CMC dan tender pekerjaan Konstruksi DB

Komponen *Loan* Proyek Eco Fishing Port

Components	Project Budget
	AFD Loan
	MEUR
Component 1 - Redevelopment and organization of the port area	85,99
Component 2 - Implementation of the sustainability approach of fishing ports and fisheries	7,04
Component 3 - Strengthening institutional and technical capacities of KKP at central and port level, and project management	5,64
Total	98,67

Sasaran Kegiatan (SK) 2 – Terwujudnya layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup Direktorat Kepelabuhanan Perikanan

Indikator Kinerja (IK) pada SK 2 yaitu:

- IP ASN Direktorat Kepelabuhanan Perikanan.
- Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Kepelabuhanan Perikanan.
- Persentase penyerapan anggaran Direktorat Kepelabuhanan Perikanan.
- Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Kepelabuhanan Perikanan.

Indikator Kinerja (IK) 16 – IP ASN Direktorat Kepelabuhanan Perikanan

Indeksi Profesionalitas ASN (Aparatur Sipil Negara) adalah suatu ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat profesionalisme ASN di Indonesia. Indeks ini dikembangkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai instrumen untuk mengukur sejauh mana ASN menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional sesuai dengan prinsip-prinsip meritokrasi.

Berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, Kriteria pengukuran tingkat Profesionalitas ASN diukur melalui dimensi Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja dan Disiplin, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Dimensi Kualifikasi, digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai kualifikasi pendidikan formal PNS dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah. Dimensi Kualifikasi diperhitungkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari keseluruhan pengukuran.
- b. Dimensi Kompetensi, digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan. Dimensi kompetensi diperhitungkan sebesar 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan pengukuran.
- c. Dimensi Kinerja digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS. Dimensi Kinerja diperhitungkan sebesar 30% dari keseluruhan pengukuran.
- d. Dimensi Disiplin digunakan untuk mengukur data/informasi kepegawaian lainnya yang memuat hukuman yang pernah diterima PNS. Dimensi Disiplin diperhitungkan sebesar 5% (lima persen) dari keseluruhan pengukuran.

Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Kepelabuhanan Perikanan pada semester I tahun 2026 tidak dilakukan perhitungan karena ditargetkan semesteran.

Upaya yang dapat dilakukan dalam rangka perbaikan capaian Indikator Kinerja ini adalah mendorong serta memonitor partisipasi pegawai Direktorat Kepelabuhanan untuk ikut serta dalam pelatihan maupun seminar yang dapat mendukung kinerja, dan mengunggah sertifikat pelatihan dan seminar yang didapat kedalam aplikasi MyASN.

Indikator Kinerja (IK) 17 – Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Kepelabuhanan Perikanan.

Indikator ini menunjukkan jumlah rekomendasi hasil pengawasan kepada Direktorat Kepelabuhanan Perikanan berdasarkan LHP yang terbit pada periode Oktober 2024 - Juni 2026 yang dokumennya telah ditindaklanjuti dan disampaikan (status tindak lanjut adalah tuntas dan/atau proses) oleh Direktorat Kepelabuhanan Perikanan.

Tabel 4. Capaian IK “Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Kepelabuhanan Perikanan” Triwulan I Tahun 2026

SK 2		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup Direktorat Kepelabuhanan Perikanan										
IK 17		Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (persen)										
Realisasi 2021-2025					Realisasi 2026					Renstra DJPT		
TW I Tahun 2021	TW I Tahun 2022	TW I Tahun 2023	TW I Tahun 2024	TW I Tahun 2025	Target Tahun 2026	Target TW I	Realisasi TW I	% Realisasi thd target TW I	% Realisasi thd Target Tahun 2026	Target Renstra 2026	% Capaian Tahun 2026 thd Target Akhir Renstra	
100	100	100	83,63	60	86	86	100	112,94	116,28	-	-	

Pada triwulan I Tahun 2026, tidak terdapat sisa temuan Inspektorat Jenderal KKP pada Satker Direktorat Kepelabuhanan Perikanan. Capaian ini tidak lepas dari usaha Direktorat Kepelabuhanan Perikanan dalam menindaklanjuti temuan tepat waktu dan pemenuhan semua dokumen yang diminta secara lengkap.

Tabel 5.Laporan hasil pengawasan Itjen KKP lingkup Direktorat Kepelabuhanan Perikanan

PERHITUNGAN IKU TW I 2026				IKU TW I	OKTOBER 2025 - Desember 2025	JML REKOM	TL REKOM	%									
						84	63	75,00%									
						30	88	-	27	63		3	21				
						Sebelum Tindak Lanjut			Tindak Lanjut			Setelah Tindak Lanjut					
No	Pengawasan	Satker	Nomor LHP	Laporan Hasil Pengawasan		Temuan	Rekomendasi	Nilai Keuangan (Rp)	Temuan	Rekomendasi	Nilai Keuangan (Rp)	Temuan	Rekomendasi	Nilai Keuangan (Rp)			Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
OKTOBER 2025																	
1	Evaluasi	SEKRETARIAT DJPT	T.413/ITI.2/HP.470/X/2025	Hasil Evaluasi Pengelolaan Barang Milik Negara pada Ditjen Perikanan Tangkap di Provinsi DKI Jakarta	5	16	-	3	11	-	2	5					PROSES
2	Revisi	SEKRETARIAT DJPT	T.417/ITI.2/HP.380/X/2025	Hasil Revisi Dokumen Persiapan Pengadaan Bantuan Kampung Nelayan Merah Putih berupa Kapal Penangkap Ikan Ukuran Kurang dari 5 Gt Tahun Anggaran 2025	1	4	-	1	4	-	-	-					TUNTAS
3	Evaluasi	SEKRETARIAT DJPT	T.418/ITI.2/HP.470/X/2025	Hasil Evaluasi Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap dan Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap pada Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2024-2025	5	25	-	5	10	-	-	15					PROSES
4	Pemantauan	SEKRETARIAT DJPT	T.450/ITI.2/HP.550/X/2025	Hasil Pemantauan Implementasi Manajemen Risiko TA 2025 pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap di Provinsi DKI Jakarta	2	4	-	2	4	-	-	-					TUNTAS
5	Revisi	SEKRETARIAT DJPT	T.482/ITI.2/HP.380/X/2025	Hasil Revisi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-R/L) Pagu Alokasi Anggaran Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap TA 2026	4	7	-	3	6	-	1	1					PROSES
NOVEMBER 2025																	
6	Revisi	SEKRETARIAT DJPT	T.505/ITI.2/HP.380/X/2025	Hasil Revisi atas Rencana Perbaikan Utang Kapal Hasil Rampasan yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah	2	4	-	2	4	-	-	-					TUNTAS
7	Revisi	SEKRETARIAT DJPT	T.507/ITI.2/HP.380/X/2025	Hasil Revisi Penghapusan Sebab-sebab Lain dan Penjumlahan atas 24 Unit BMN Gedung dan Bangunan pada PPN Pengembangan	1	2	-	1	2	-	-	-					TUNTAS
8	Revisi	DIT KAPI	T.508/ITI.2/HP.380/X/2025	Hasil Revisi Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan Desain Kapal Penangkap Ikan dalam Rangka Mendukung Program Bantuan KKNP TA 2025 pada Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	2	2	-	2	2	-	-	-					TUNTAS
9	Revisi	SEKRETARIAT DJPT	T.510/ITI.2/HP.380/X/2025	Hasil Revisi atas Aset yang Tidak Diusulkan pada Satker Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual Provinsi Maluku	1	3	-	1	3	-	-	-					TUNTAS
10	Revisi	SEKRETARIAT DJPT	T.517/ITI.2/HP.380/X/2025	Hasil Revisi Penghapusan Sebab-sebab Lain atas 28 Unit BMN Gedung dan Bangunan pada PPN Pengembangan	1	2	-	1	2	-	-	-					TUNTAS
11	Revisi	SEKRETARIAT DJPT	T.519/ITI.2/HP.380/X/2025	Hasil Revisi Usulan Penghapusan Sebab-sebab Lain atas 2 (dua) Unit BMN Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan Provinsi Bali	1	2	-	1	2	-	-	-					TUNTAS
12	Revisi	PPP TELUK BATANG	T.543/ITI.2/HP.380/X/2025	Hasil Revisi Draft Perjanjian Penggunaan Tanah di PPP Teluk Batang Provinsi Kalimantan Barat	1	1	-	1	1	-	-	-					TUNTAS
DESEMBER 2025																	
13	Revisi	SEKRETARIAT DJPT	T.590/ITI.2/HP.380/X/2025	Hasil Revisi Laporan Pengawasan Pasar Ikan Tiakur Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan SPT Moca	1	2	-	1	2	-	-	-					TUNTAS
14	Revisi	SEKRETARIAT DJPT	T.631/ITI.2/HP.380/X/2025	Hasil Revisi atas Usulan Tambahan Rincian Output/RO Kegiatan Sector Loan For Integrated Fishing Ports and International Fish Market Phase I Pada Ditjen Perikanan Tangkap TA 2025	1	2	-	1	2	-	-	-					TUNTAS
15	Revisi	SEKRETARIAT DJPT	T.765/ITI.2/HP.380/X/2025	Hasil Revisi Usulan Revisi Anggaran penambahan Rincian Output (RO) khusus lingkup Ditjen Perikanan Tangkap TA 2025 di Prov. DKI Jakarta	1	4	-	1	4	-	-	-					TUNTAS
16	Revisi	SEKRETARIAT DJPT	T.793/ITI.2/HP.380/X/2025	Hasil Revisi terhadap Usulan Penghapusan BMN yang berdampak rencana Pembangunan Pelabuhan Perikanan di PPN Kijau melalui PPN Lender Islamic Development Bank (SIDB)	1	4	-	1	4	-	-	-					TUNTAS

Indikator Kinerja (IK) 18 – Persentase penyerapan anggaran Direktorat Kepelabuhanan Perikanan

Dukungan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan di Direktorat Kepelabuhanan Perikanan Tahun Anggaran 2026 adalah sebesar Rp. **85.399.629.000**. sesuai dengan DIPA Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dengan nomor DIPA: SP-DIPA 032.03.1.238720/2025 tanggal 1 Desember 2025. Anggaran tersebut dengan kegiatan utama Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan. Sampai dengan Triwulan I tahun 2026, anggaran Direktorat Kepelabuhanan Perikanan adalah sebesar Rp60.734.669.000. Capaian pelaksanaan anggaran sampai dengan akhir bulan Maret Tahun 2026 adalah sebesar Rp 6.314.976.886, dengan persentase capaian 10,40%.

No	Uraian	Anggaran	Realisasi			Total Realisasi	%	Sisa Anggaran
			Januari	Februari	Maret			
1	Tim Kerja Analisis Kebutuhan Perencanaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan	230.612.000	-	12.000.000	3.742.500	15.742.500	6,83	214.869.500
2	Tim Kerja Pengendalian Pembangunan Pelabuhan Perikanan Pembiayaan LN Lender AFD dan UPT Pusat	35.850.245.000	-	222.579.165	552.769.578	775.348.743	2,16	35.074.896.257
3	Tim Kerja Operasional dan Pengendalian Pembangunan Pelabuhan Perikanan Pembiayaan LN Lender ADB	200.000.000	-	27.719.500	39.711.000	67.430.500	33,72	132.569.500
4	Tim Kerja Kesyahbandaran Di Pelabuhan Perikanan	200.589.000	-	25.881.226	35.135.500	61.016.726	30,42	139.572.274
5	Tim Kerja Pemantauan dan Analisis Kepelabuhanan Perikanan	200.536.000	-	-	18.899.644	18.899.644	9,42	181.636.356
6	Tim Kerja Pelabuhan Pangkalan PIT dan PNB Pasca Produksi	14.131.099.000	-	1.702.870.169	1.911.251.685	3.614.121.854	25,58	10.516.977.146
7	Subbagian Tata Usaha	207.683.000	-	16.756.000	23.266.600	40.022.600	19,27	167.660.400
8	Tim Kerja Standardisasi Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	200.000.000	-	-	79.770.838	79.770.838	39,89	120.229.162
9	Tim Kerja Pengendalian Pembangunan Pelabuhan Perikanan Pembiayaan Luar Negeri Lender ISDB dan Lender JICA	9.513.905.000	-	357.262.889	1.285.360.592	1.642.623.481	17,27	7.871.281.519
TOTAL		60.734.669.000	-	2.365.068.949	3.949.907.937	6.314.976.886	10,40	54.419.692.114

Indikator Kinerja (IK) 19 – Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Kepelabuhanan Perikanan

Indikator Penilaian Mandiri SAKIP adalah indikator yang mengukur implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui penilaian mandiri dengan aspek penilaian antara lain perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja

Nilai PM SAKIP Direktorat Kepelabuhanan Perikanan dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Direktorat Kepelabuhanan.

Indikator Kinerja Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Kepelabuhanan Perikanan pada Triwulan I Tahun 2026 belum dilakukan penghitungan, karena Indikator Kinerja ini ditargetkan tahunan.

3.3. Akuntabilitas Keuangan

Dukungan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan di Direktorat Kepelabuhanan Perikanan Tahun Anggaran 2026 adalah sebesar Rp. **85.399.629.000**. sesuai dengan DIPA Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dengan nomor DIPA: SP-DIPA 032.03.1.238720/2025 tanggal 1 Desember 2025. Anggaran tersebut dengan kegiatan utama Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan. Sampai dengan Triwulan I tahun 2026, anggaran Direktorat Kepelabuhanan Perikanan adalah sebesar Rp60.734.669.000. Capaian pelaksanaan anggaran sampai dengan akhir bulan Maret Tahun 2026 adalah sebesar Rp 6.314.976.886, dengan persentase capaian 10,40%.

Tabel 6. Penyerapan anggaran berdasarkan Sasaran Kegiatan Triwulan I Tahun 2026

No	Sasaran Kegiatan	Target Anggaran TW I 2026 (pagu revisi)	Realisasi Anggaran TW I 2026	NPSS	% Realisasi Anggaran
1.	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan yang Optimal dan Bertanggungjawab	60.734.669.000	6.314.976.886	100	10,40
2.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Kepelabuhanan Perikanan	-	-	116,28	-

BAB IV. PENUTUP

Kesimpulan

Laporan Kinerja Direktorat Kepelabuhanan Perikanan Triwulan I Tahun 2026 menyajikan capaian Indikator Kinerja selama pelaksanaan Triwulan I Tahun 2026. Berdasarkan hasil evaluasi, dapat disimpulkan bahwa ada 2 Indikator Kinerja yang perhitungannya dilakukan pada triwulan I, yaitu:

1. Persentase Pelabuhan perikanan yang dikembangkan dan ditingkatkan fasilitasnya (persen) telah tercapai 100%, dengan capaian 1,3% dari target 1,3% pada triwulan I Tahun 2026.
2. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Direktorat Kepelabuhanan Perikanan Pada Triwulan I Tahun 2026. Capaian IK ini adalah 100% dari target 86%, dengan persentase capaian 116,28%. Capaian dimaksud merupakan hasil penilaian dari Inspektorat Jenderal melalui aplikasi SIDAK untuk periode Triwulan I Tahun 2026 periode Oktober 2025 – Desember 2025 dengan hasil semua temuan sudah ditindaklanjuti secara tuntas.

Tindak Lanjut Rekomendasi Periode Sebelumnya

1. Telah dilakukan pengarahannya kepada seluruh ASN Direktorat Kepelabuhanan Perikanan untuk meningkatkan partisipasi dalam peningkatan IP ASN.
2. Terus melakukan update terhadap temuan Inspektorat Jenderal KKP melalui aplikasi SIDAK.

Rekomendasi Tindak Lanjut

1. Mengarahkan kepada seluruh ASN Direktorat Kepelabuhanan Perikanan untuk meningkatkan partisipasi dalam peningkatan IP ASN.
2. Terus memantau dan menyelesaikan tindak lanjut atas LHP Itjen pada aplikasi SIDAK.

